



PEMBANGUNAN BERWAWASAN MANUSIA

Tawaran Alternatif

Coen Husain Pontoh

Kata Pengantar:
Ruth Indiah Rahayu

Pembangunan Berwawasan Manusia Tawaran Alternatif
Coen Husain Pontoh

INDOPROGRESS

Judul	: Pembangunan Berwawasan Manusia Tawaran Alternatif
Editor	: Coen Husain Pontoh
Desain Sampul & Isi	: Rinto Pangaribuan
Penerbit	: Pustaka IndoPROGRESS, 2021

Daftar Isi

- 2 Kata Pengantar: Kemanusiaan
Marx dalam Praktik Sosialisme
di Kuba dan Kerala

- 27 Demokrasi Partisipatoris: Contoh
Kasus Pemilihan Umum di Kuba

- 75 Kesehatan Buat Semua: Belajar Pada
Kuba

- 126 Sosialisme Dari Bawah: Pengalaman
di Kerala (India)

- 163 Biodata Penulis

Kata Pengantar

Kemanusiaan Marx dalam Praktik Sosialisme di Kuba dan Kerala

Ruth Indiah Rahayu

[...] tak ada filsuf yang memiliki konsep kemanusiaan semegah Marx, dan tak ada konsepsi filosofis yang berakar mendalam pada keniscayaan masyarakat manusia, yaitu tenaga kerja dan produksi [...]

(Raya Dunayevskaya, *Marxism and Freedom*,
1958)¹

DUNAYEVSKAYA adalah seorang filsuf pe-

¹ Raya Dunayevskaya, *Marxism and Freedom*, (New York: Bookman Associates, 1958), 21

rempuan Marxis dan juga feminis, yang berupaya keras menunjukkan bahwa seluruh karya “Marx Muda” maupun “Marx Dewasa”² konsisten dalam menempatkan manusia sebagai subjek sejarah. Lalu dalam keterasingan manusia sebagai subjek akibat tenaga kerjanya dijadikan objek komoditas, makna revolusi adalah pembebasan manusia dari keterasingannya dan agar kembali memeluk dirinya sebagai subjek manusia yang otonom.³ Dengan sepenuh keyakinan, Dunayevskaya mendeklarasikan bahwa Marx

² Dunayevskaya berpendapat dalam *Nationalism, Communism, Marxist Humanism, and the Afro-Asian Revolution*, (Chicago: A News and Letters Publication, 1984), 22-23, bahwa komunis Rusia dalam masa Stalin telah menghancurkan humanisme Marx dan mengubahnya menjadi doktrin negara untuk menghadapi invasi Nazi pada 1943. Sementara Revolusi di Hungaria, Polandia, menekankan bahwa komunisme menuntut pembebasan kemanusiaan –individu dalam kerangka masyarakat dari keadaan alienasi oleh kelompok dominan dalam masyarakat. Dunayevskaya tidak sepakat dengan pandangan Althusser bahwa humanisme hanya ada pada karya “Marx Muda” tetapi tidak pada karya “Marx Dewasa”

³ Karl Marx, *Economic and Philosophic Manuscript 1844*, (Moscow: Progress Publishers, 1959)

adalah seorang humanis, dan filsafatnya adalah mengenai humanisme.⁴

Apa implikasi ekonomi politik bahwa filsafat Marx adalah humanis? Implikasinya ialah bahwa revolusi untuk pembebasan manusia, pada titik kemenangannya, adalah membangun kembali manusia baru melalui program sosialisme dan pada akhirnya mencapai komunisme (penghapusan kepemilikan pribadi). Dunayevskaya mengatakan demikian:

Marxisme adalah sebuah teori tentang pembebasan atau malahan tidak sama sekali. Marx memiliki keprihatinan terhadap masalah kebebasan manusia, sementara kehidupan manusia tanpa dapat dielakkan telah terperangkap ke dalam hukum pembangunan kapitalisme.⁵

Namun, sesudah fase pembebasan manusia (revolusi), Marxisme dihadapkan pada tan-

⁴ Dunayevskaya, *Marxism and Freedom*, 21

⁵ Dunayevskaya, *Marxism and Freedom*, 22

tangan objektif: yaitu realitas sejarah masyarakat di mana revolusi itu berlangsung. Karena itu perwujudan sosialisme menjadi banyak ragam dan bukan tanpa perdebatan di kalangan pengampanya, bahkan bukan tanpa kontradiksi dari dalamnya sendiri. Maka membaca keragaman praktik sosialisme di banyak tempat, yang “kecil-kecil” signifikan kita lakukan untuk memperkaya rujukan.

Coen Husain Pontoh membantu kita untuk membaca sebuah praktik sosialisme di negara kecil: Kuba dan Kerala dalam tiga esai yang enak dibaca. Struktur esai yang ditulis Coen mencakup (1) demokrasi sosialisme versi Kuba, (2) pelayanan kesehatan di Kuba, dan (3) praktik sosialisme di Kerala—salah satu negara bagian di India. Ketiga esai ini menggambarkan bagaimana Kuba dan Kerala berupaya untuk membangun manusia baru sebagai subjek dengan moral non-material sebagai negasi atas kepemilikan pribadi.

* * *

Mengapa kedua negara mungil itu tetap bertahan setelah Uni Sovyet dan Tembok Berlin ambruk pada awal 1990-an? Mengapa Kuba tidak mati sepanjang diembargo oleh Amerika Serikat (AS) sejak 1960 hingga saat ini? Bagaimana si mungil Kuba mampu bertahan dan bahkan, untuk aspek layanan kesehatan, dapat melampaui AS yang berusaha menghancurkannya? Praktik sosialisme seperti apa yang membuatnya memiliki daya tahan?

Kita ingat Donald Trump pada saat menjabat presiden AS telah melontarkan hinaan: *"Warisan Castro adalah penderitaan, kemiskinan dan pengingkaran hak asasi manusia"*. Penghinaan Trump itu persis yang dilontarkan oleh kerabat saya pada saat menyambut seorang kerabat dari Havana berkunjung ke Indonesia pada 2002. Kerabat yang lain terkaget-kaget melihat penampilannya: kemeja, celana, kopor, jam tangan, tas, dompet, sepatu, yang serba butut dari mo-

del akhir dekade 1960-an. Penampilan itu mengesankan: betapa miskin dan ketinggalan mode! Maka bermunculan komentar penghinaan: *"Begitulah jika hidup di negara sosialis! Miskin dan suram!"*, dan banyak yang bersyukur bahwa *"Kita terselamatkan dari rencana PKI untuk membuat Indonesia menjadi sosialis"*.

Sebaliknya, kerabat dari Havana terheran-heran melihat orang Indonesia sangat fetisis (memuja) terhadap barang mewah seperti mobil, rumah, pakaian, sepatu, tas, dan lainnya. Ia tak mengira perkembangan orang di Indonesia setelah Soekarno telah menjadi makhluk konsumernya yang sangat boros. Saya pun heran bagaimana kerabat dari Havana itu sangat sehat dalam kesederhanaannya, sementara kerabat di Indonesia yang berbalut barang mewah tubuhnya rata-rata keropos.

Dalam buku saku ini, keheranan saya atas tubuh kerabat saya yang sehat dalam balutan kesederhanaan memperoleh jawabannya. Coen

menggambarkan bagaimana praktik sosialisme di Kuba dimulai dari penghormatan terhadap kemanusiaan yang paling dasar, yaitu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di Kuba pada akhirnya mendapat pengakuan World Bank dan World Health Organization (WHO). Angka harapan Hidup (AHH) bayi yang terlahir pada 2011 di Kuba mencapai 79 tahun, lebih panjang daripada bayi yang lahir di AS, padahal GNP AS delapan kali lebih besar daripada Kuba. Sementara WHO mengakui jaminan kesehatan di Kuba terbaik di dunia dan mengungguli AS. Keunggulan Kuba atas AS dalam hal membangun kualitas hidup manusianya makin mengesankan mengingat AS telah memblokade ekonomi Kuba sejak 1960. Begitu juga pembangunan di Kerala telah dipromosikan para ahli sebagai model pembangunan yang berhasil dalam pemenuhan hak dasar manusia.

Pemenuhan hak dasar manusia, dalam hal ini pelayanan kesehatan, adalah suatu praktik

dalam sosialisme untuk memulihkan manusia menjadi subjek yang dapat berpartisipasi dalam proses produksi. Aspek manusia seringkali luput kita refleksikan sebagai yang ontologis dalam pemikiran Marx mengenai *being*, bukan sebagai Roh Absolut sebagaimana pendapat Hegel, melainkan *being* yang menciptakan sejarah—mengaktualisasikan potensinya untuk mengolah dunia.⁶

Saya sependapat dengan pandangan Dunayevskaya bahwa pertanyaan tentang sosialisme (*socialism question*) bukan berhenti sebagai rumusan ideologis, sebuah dogma dan doktrin, tetapi lebih mendasar sebagai rumusan filosofis mengenai manusia.

Dalam *Manuscript 1844* (paragraf 22 tentang *Estranged Labour*), Marx menulis demikian:

⁶ Raya Dunayevskaya, *Philosophy and Revolution*, (New Jersey & Sussex; Humanities Press & Harvester Press, 1982), 50

Faktanya bahwa para pekerja merasa terasing dari apa yang dikerjakannya (kehilangan sifat intrinsik atas pekerjaannya....Maka dari itu dia menyangkal dirinya sendiri, tidak bahagia, tidak mengembangkan secara bebas fisik dan mentalnya, bahkan mematikan tubuhnya dan menghancurkan pikirannya....Oleh karena itu para pekerja merasa terasing dari apa yang dikerjakannya dan apa yang dikerjakannya berada di luar dirinya [...]

Marx sangat jelas dalam menempatkan manusia sebagai pusat pemikirannya. Menurut Marx, manusia hidup adalah makhluk kreatif yang memiliki kemampuan membangun dunia di luar dirinya sebagai ekspresi kekuatannya. Oleh sebab itu, ketika manusia sebagai subjek terasing dari sifat alaminya (sifat intrinsik), yaitu mengaktualkan potensi yang ada pada dirinya, maka manusia menjadi terasing bagi dirinya. Akibat, manusia tidak bahagia.

Apa implikasi praktis mengenai manusia sebagai subjek dengan sifat intrinsiknya itu? Ma-

nesia adalah tenaga kerja yang otonom bagi dirinya (bukan bagi kepentingan akumulasi kapital bagi orang lain). Manusia dan potensi tenaga kerjanya bermukim di dalam kesatuan tubuh—termasuk rasio dan hati—dan melalui kebutuhannya itu manusia berelasi dengan realitas dunia—alam, binatang, tumbuhan, dan manusia lainnya. Maka dari itu, pada hemat saya, tubuh yang sehat menjadi jantung aktivitas manusia untuk mengaktualisasikan potensi dirinya bagi pengembangan hidup kemanusiaannya.

Implikasi kebijakan untuk menjaga dan merawat tubuh yang sehat ada pada negara yang melayani kesehatan warganya dengan baik. Kiranya Kuba setelah revolusi penggulingan rezim Fulgencio Batista pada 1959, dan kemudian Fidel Castro mendeklarasikan revolusi tersebut sebagai revolusi sosialis pada 1961, konsisten dalam upaya memraksiskan pandangan Marx mengenai manusia. Hal itu terlepas dari pertanyaan apakah Castro telah mempersiapkan de-

mikian detail sebuah rancangan untuk merealisasikan sosialisme atau bahkan komunisme atau ia merancang kebijakan sambil berjalan (*living policy*) dalam kendali negara.

Fakta bahwa setelah 1961, para sukarelawan muda yang pada 1959 turut dalam revolusi dikirim ke pedesaan untuk menyebarkan literasi pada petani. Sebaliknya, sukarelawan yang orang kota itu pun diwajibkan belajar pertanian pada para petani. Hingga terjadi program dua arah untuk saling belajar dan hal itu diharapkan dapat memperkecil jurang pedesaan dan perkotaan.

Lalu sejumlah besar sekolah dan pusat kesehatan dibangun di pedesaan di tengah penghasilan gula turun 30 persen pada 1959-1963. Keadaan ini mempercepat pemerintah Kuba untuk menasionalisasi 70 persen perkebunan menjadi milik negara, termasuk mengambil alih sektor industri, perdagangan dan keuangan.

Penting untuk digarisbawahi bahwa aspek manusia dalam pemikiran Marx telah menjadi perhatian utama Che Guevara yang membantu revolusi Kuba 1959. Che menanamkan moral manusia ke dalam masyarakat Kuba pada saat ia memegang jabatan menteri ekonomi sepanjang paruh awal 1960-an. Ia menentang gagasan komunis konvensional tentang perlunya memberikan insentif materi dalam pembangunan awal ekonomi sosialis.⁷

Dalam 'peluang' krisis ekspor gula, Che dan Castro fokus membangun moralitas non-materi, yaitu mendorong orang kota dan desa untuk terjun dalam pertanian gula dengan insentif berupa bendera, diploma dan gelar kepada individu maupun kolektif yang menyumbangkan tenaga kerjanya untuk lembur atau menunjukkan produktivitasnya yang luar biasa (Newman: 2005, 69-70). Kebijakan ini simultan dengan pemba-

⁷Michael Newman, *Socialism: A Very Short Introduction*, (Oxford: Oxford University Press, 2005), 70.

ngunan, sekolah-sekolah dan klinik kesehatan, di mana insentif non-material diwujudkan berupa pelayanan terhadap pendidikan dan kesehatan gratis.⁸

Coen mengutip pidato Che mengenai kesehatan yang menekankan pada moral manusia (bukan uang) seperti ini:

Dalam pidatonya pada tahun 1960, Che mengatakan, hasil dari revolusi bukan saja jatuhnya rezim lama (Batista), tapi juga runtuhnya sistem lama (kapitalisme). Dalam sistem baru ini, Kuba punya kesempatan untuk menciptakan manusia-manusia baru yang sesuai dengan nilai-nilai dari sistem baru (sosialisme) tersebut. Dalam konteks pembangunan sistem kesehatan baru, menurut Che, Kuba harus bisa menciptakan dokter-dokter yang revolusioner, yang melihat profesinya bukan sebagai ajang untuk memperkaya diri dan mengejar karier pribadinya, melainkan untuk membebaskan

⁸ Newman, *Socialism*, 71

masyarakat Kuba secara keseluruhan (Coen Pontoh, “Kesehatan Buat Semua”)

Pembangunan “moral manusia” dan bukan “moral uang” sebagai sokoguru sosialisme di Kuba, kiranya menjadi pendasaran mengapa si mungil Kuba mampu bertahan menghadapi blokade ekonomi dari AS sejak Batista diturunkan, kemudian mulai dibuka pada saat Barack Obama dan kencang kembali saat Trump. Dampak blokade menutup arus perdagangan timbal balik, termasuk penjualan gula dari Kuba dan pembelian alat-alat iptek dari AS. Rupanya, ketahanan menghadapi blokade tersebut tidak lain karena pendasaran moralitas ekonomi-politik sosialisme Kuba dalam hubungan produksi insentif non-material.

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, moralitas manusia Kuba telah menunjukkan kemandirian dan kedaulatannya, tidak mengimpor vaksin, melainkan membuat sendiri. Melalui WhatsApp pada Mei 2021, kerabat saya di Ha-

vana bercerita dengan bangganya, “Kami sudah vaksin Abdala buatan kolega saya di Instituto Finlay de Vacunas yang berkemanjuran 92,28 persen”. Instituto Finlay de Vacunas adalah sebuah lembaga penelitian pembuatan vaksin di Kuba, yang bekerja sama dengan Pusat Rekayasa Genetika dan Bioteknologi telah berhasil mengembangkan tiga jenis vaksin COVID-19, yaitu Soberana 1, Soberana 2 dan Abdala.⁹ Kerabat saya itu termasuk yang menjadi sasaran uji klinis dan telah berhasil dengan baik.

“Mulanya kami diragukan apakah bisa membuat vaksin dan kami mempertaruhkan reputasi kami di kalangan ilmuwan dari negara-negara kaya. Kami berhasil. Sekarang negara-negara tetangga di Amerika Latin telah memesan vaksin Kuba”, tambahnya.

⁹ Term *Soberano* dari bahasa Spanyol yang artinya kedaulatan. Sedangkan term *Abdala* diambil dari karya pejuang kemerdekaan, Jose Marti, sebuah drama patriotik yang ditulis dalam bentuk syair

Kerabat saya itu ahli metalurgi dan berperan dalam merekayasa ampas tebu menjadi energi alternatif dan (semacam) rumput gajah untuk pakan sapi perah. Rekayasa rumput untuk meningkatkan produksi dan kualitas susu sapi perah itu sangat membantu kebutuhan gizi dan keju bagi rakyat Kuba hingga tak perlu impor. Serupa pada saat menghadapi pandemi COVID-19 ini, ilmuwan Kuba pun segera melakukan riset untuk membuat vaksin sendiri hingga tak perlu impor.

Kemandirian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia tidak pupus di Kuba hingga saat ini. Sosialisme mereka tetap memegang teguh aspek kemanusiaan Marx, meskipun untuk itu Kuba ditempatkan sebagai negara miskin di dunia ini.

Begitu pula di Kerala yang kecil dan miskin sebagaimana negara bagian lainnya di India, tetapi direkomendasikan oleh banyak ahli pembangunan sebagai salah satu model pembangunan

yang berhasil. Apa yang berhasil? Bukan warga-nya mampu hidup mewah dan boros, melainkan apa yang disebut ekonom penerima hadiah Nobel Amartya Sen, memperkecil ketidakadilan dan memperbesar kapabilitas manusianya.¹⁰

* * *

Pengujian kembali humanisme Marx di bidang politik telah diuraikan Coen dalam praktik demokrasi di Kuba. Strategi Coen untuk mengangkat demokrasi di Kuba sangat tepat untuk membuka mata banyak orang bahwa sosialisme tidak sama dengan rezim otoritarian. Pada umumnya, bahkan sebagian ilmuwan sosial di Indonesia –seperti halnya politisi dan sebagian ilmuwan sosial di AS, menuduh Kuba tidak

¹⁰ Amartya Sen, *Inequality Reexamined*, (New York & Oxford: Oxford University Press, 1992), 81. Kapabilitas adalah hakekat yang melekat pada diri manusia, tetapi kapabilitas itu seringkali tidak dapat berfungsi dalam situasi dirinya mengalami represi. Melalui kapabilitas itu manusia berupaya mencapai sesuatu yang bernilai dengan syarat adanya kebebasan, *power* dan peluang.

demokratis hanya karena dipimpin oleh partai tunggal. Dalam esai tersebut, Coen dapat menyanggah kekeliruan pandangan dari sudut pandang liberal tersebut dengan menguraikan praktik politik dan demokrasi baik di Kuba maupun Kerala.

Apabila kita memperbincangkan demokrasi, maka partisipasi merupakan kata kunci yang dapat mengukur kapabilitas manusia di Kuba dan Kerala terhadap penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, sayang sekali Coen terluput mengangkat partisipasi perempuan dalam struktur Partai Komunis Kuba (PCC) dan struktur *Organ of People's Power* (*Organos de Poder Popular*, OPP). PCC memegang tampuk pemerintahan dan negara, sedangkan OPP merupakan dewan perwakilan rakyat dari tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.

Berkaitan dengan perlunya kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam PCC dan OPP, Castro telah menegaskan:

Kami mempunyai sebuah partai yang persentase kepemimpinan terbesar masih didominasi laki-laki, begitu juga di dalam pemerintahan. Mulai saat ini, pada saatnya, kita akan mempunyai pemimpin perempuan yang duduk di partai, pemerintahan dan negara, yang seimbang dengan laki-laki (kutipan dari Luciak: 2005)

Ilja Luciak memeriksa partisipasi perempuan dalam OPP, sejak 1976 sampai 2003, terutama pada tingkat provinsi dan nasional telah melampaui kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Sementara di keterwakilan perempuan di DPR Indonesia pada tahun yang sama (2003) sekitar 18 persen, masih jauh dari Kuba.¹¹

¹¹ Ilja Luciak, "Party and State in Cuba: Gender Equality in Political Decision Making", *Politics and Gender* 1 (02): 241-263, June 2005, diunduh dari https://www.researchgate.net/publication/231936396_Party_and_State_in_Cuba_Gender_Equality_in_Politic

Table 1. Women's participation in legislative assemblies (Poder Popular), 1976-2003

	1976		1981		1986		1993		1997/8		2002/3	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%
National Assembly	105	21.8	113	22.7	173	33.9	134	22.8	166	27.6	219	35.9
Provincial assemblies	192	17.2	191	16.8	426	30.8	284	23.9	342	28.6	451	37.6
Municipal assemblies	856	8.2	837	7.8	2,264	17.1	1,879	13.5	2,595	17.9	3,493	23.4

Source: National Election Commission 2002, data obtained by the author.

Adapun keterwakilan perempuan dalam PCC, pada awal revolusi sangat sedikit jumlah mereka yang menjadi anggota partai. Kemudian pada 1967, ada 10 persen perempuan anggota partai, lalu berkembang menjadi 15 persen pada 1974. Keanggotaan perempuan dalam partai meningkat pesat sejak 1985 menjadi 22 persen, pada 1993 menjadi 26 persen dan pada 1995 menjadi 29 persen. Pada 1997 menjadi angkanya mencapai 30 persen lebih dari total anggota partai sebanyak 767.944 orang.¹²

¹² Luciak, "Party and State in Cuba, 259

Table 5. Women's participation in the Cuban Communist Party, 1993–1997

<i>Membership Level</i>	<i>Percent Women 1993</i>	<i>Percent Women 1997</i>	<i>Percent Change 1993–1997</i>	<i>Rate of Increase</i>
Provincial committee	20.6	23	2.4	11.7
Municipal committee	15.5	22	6.5	41.9
Party professionals	19.5	25	5.5	28.2
Party members	26.3	30.1	3.8	14.4
Average	20.5	25	4.5	24.1

Source: Partido Comunista de Cuba, Departamento de Organización

Data itu memperlihatkan bahwa partisipasi (keterwakilan) perempuan di bidang politik di negeri sosialis melampaui kuota 30 persen sebagaimana ketentuan PBB. Dan memang sejarah gerakan perempuan di Kuba telah mengiringi revolusi penggulingan Batista hingga membangun manusia baru sosialisme.

Adapun partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik di Kerala tidak pernah melebihi 10 persen, meskipun di antara partai lainnya, Partai Komunis India telah membuka peluang lebih besar, yaitu 16 persen diberikan

kepada perempuan. Lebih dari setengah kursi yang diberikan kepada perempuan adalah kursi yang dijamin kemenangannya.¹³ Hambatan perempuan untuk menjadi subjek politik sebagian besar karena tradisi dan beban ganda perempuan dalam kemiskinan mereka. Itu sebabnya, program Partai Komunis di Kerala cukup gencar dalam peningkatan kapabilitas perempuannya.

* * *

Akhirnya pengantar ini saya tutup dengan pernyataan Marx dalam *Manuscript 1844*

Kita telah menyaksikan apa yang signifikan diberikan oleh sosialisme, yaitu kesejahteraan berdasarkan kebutuhan manusia dan..... signifikansi yang diperoleh berupa kekuatan baru yang berasal dari sifat (intrinsik) manusia dan pengayaan baru yang berasal dari sifat (intrinsik) manusia.....Di bawah (rezim) kepemilikan pribadi, signifikansi itu diba-

¹³ Jisha Surya, "In Six Decades, the Percentage of Women MLAs in the Kerala Assembly has Never Exceeded 10%", *Scroll.in*, 1 April 2021

lik....setiap orang berspekulasi untuk menciptakan kebutuhan baru dalam diri orang lain (ekstrinsik) dan meminta pengorbanan dari orang lain [...]¹⁴

Untuk merealisasi apa yang dikatakan Marx di atas, yaitu membalik konsep kesejahteraan manusia berdasarkan kepentingan kepemilikan pribadi menjadi kepentingan berdasarkan kebutuhan intrinsik manusia ternyata sangat berat. Kuba dan Kerala menjadi contoh dalam konsistensi membangun subjek manusia berdasarkan kebutuhan intrinsiknya, tetapi dipandang miskin menurut ukuran konsumerisme dan pendapatan perkapita. Sekali pun pada akhirnya diakui kemandirian dan kedaulatannya dalam pembangunan kemanusiaan oleh World Bank maupun WHO selaku institusi yang merepresentasikan kapitalisme.

Rupanya sosialisme dalam praktik masih be-

¹⁴ Marx, "Human Requirements and Division of Labour Under the Rule of Private Property", dalam *Manuscript 1844*, XIV (35)

lum final, tetapi yang signifikan dalam esai-esai Coen adalah gambaran tentang fundamen keberhasilan dua negara kecil dalam membangun manusia sosialis. Mungkin benar: kecil itu indah! ***

Cengkareng, 24 Juli 2021

Ruth Indiah Rahayu adalah kandidat doktor di bidang filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Saat ini adalah Kepala Divisi Pendidikan IndoPROGRESS Institute for Social Research and Education (IISRE) dan aktif di Masyarakat Filsafat Indonesia (MFI).

Daftar Pustaka

Dunayevskaya, Raya, *Marxism and Freedom*,
(New York: Bookman Associates, 1958)

_____, *Nationalism, Communism,
Marxist Humanism, and the Afro-Asian*

Revolution, (Chicago: A News and Letters Publication, 1984)

Philosophy and Revolution,
(New Jersey & Sussex; Humanities Press &
Harvester Press, 1982)

Luciak, Ilja, "Party and State in Cuba: Gender Equality in Political Decision Making",
Politics and Gender 1 (02): 241-263, June 2005

Marx, Karl, *Economic and Philosophic Manuscript 1844*, (Moscow: Progress Publishers, 1959)

Newman, Michael, *Socialism: A Very Short Introduction*, (Oxford: Oxford University Press, 2005)

Sen, Amartya, *Inequality Reexamined*, (New York & Oxford: Oxford University Press, 1992)

Bab I

Demokrasi Partisipatoris

—Contoh Kasus Pemilihan Umum di Kuba—

Pengantar

KUBA adalah negara yang oleh Amerika Serikat (AS) dituduh tidak demokratis, bahkan dimasukkan ke dalam daftar negara teroris. Alasannya, karena Kuba tidak mempunyai sistem pemilihan mirip Amerika Serikat, Fidel Castro yang secara konsisten menolak hegemoni politik dan militer AS selama puluhan tahun, dan karena komunisme dipandang telah gagal sebagai sebuah ideologi.

Sebagai sebuah negara sosialis yang tetap bertahan hingga saat ini, Republik Kuba (Republic of Cuba) dianggap sebagai fosil peninggalan kejayaan sistem Komunisme di masa lalu. Bagi AS, keberadaan Kuba yang sosialis terasa mengotori halaman belakang rumahnya yang megah. Karena itu, upaya membersihkannya tak pernah usai, misalnya, dengan terus menerapkan kebijakan embargo/blokade ekonomi yang telah berlangsung selama enam dekade lebih. Kebijakan ini tak pelak sangat menyengsarakan rakyat Kuba.

Secara geografis, menurut The World Factbook yang dikeluarkan dinas intelijen AS (Central Intelligence Agency/CIA), Kuba adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di antara Laut Karibia dan Samudera Atlantik Utara atau 150 km sebelah selatan Key West, Florida, AS. Luas wilayahnya mencapai 110,85 km persegi. Negara beriklim tropis moderat dan penghasil kobalt, nikel, dan besi ini, berdasarkan perkira-

an hingga Juli 2005, memiliki jumlah penduduk sebesar 11,346,670 jiwa. Dari segi komposisi etnis, penduduk Kuba 51 persen berasal dari etnis Mulato, 37 persen etnis kulit putih, 11 persen etnis kulit hitam, dan 1 persen dari etnis Cina. Adapun dari segi kepercayaan keagamaan, sekitar 85 persen adalah penganut Katolik Roma, sisanya adalah Protestan, Jehovah, Yahudi, dan Santeria.

Rakyat Kuba sehari-hari menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi maupun bahasa pergaulan. Di negeri yang terkenal karena produk cerutunya itu, tingkat melek huruf penduduknya sangat tinggi, di mana 97 persen dari penduduk yang berusia di atas 15 tahun bisa membaca dan menulis. Dari komposisi itu, jumlah laki-laki yang melek huruf mencapai 96,9 persen. Kuba juga merupakan negara dengan tenaga guru terbesar dan tersukses dalam bidang pendidikan. Sebelum revolusi, angka buta huruf sebesar 30 persen dan sekarang penduduk

yang buta huruf sudah tidak ada lagi. Dari segi komposisi jumlah guru-murid, untuk tingkat sekolah dasar dari setiap 20 murid dilayani oleh satu orang pengajar. Untuk tingkat sekolah menengah, satu orang pengajar melayani 15 murid. Keadaan ini menyebabkan hubungan antara guru-murid berlangsung secara intensif. Setiap guru di Kuba adalah lulusan universitas dan memperoleh pelatihan yang sangat intensif dan berkualitas selama kariernya. Yang unik dari sistem pendidikan Kuba ini, hubungan guru-murid dikelola secara kolektif. Seluruh staf pendidikan (pengajar dan pegawai administrasi) tinggal di dekat sekolah sehingga mereka saling kenal satu sama lain, dan bersama murid dan orang tuanya bekerja bersama dan menyelesaikan secara bersama masalah-masalah menyangkut bidang pendidikan dan kesehatan.¹

Masih dalam sektor pendidikan, berdasar-

¹ http://fcis.oise.utoronto.ca/~daniel_schugurensky/assignment1/1998cuba.html

kan hasil kajian perbandingan yang dilakukan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) pada 1998 terhadap siswa dari 13 negara Amerika Latin di bidang matematika dan bahasa, diperoleh hasil bahwa prestasi siswa Kuba jauh di atas prestasi siswa dari negara lainnya, yakni 350 poin. Bandingkan dengan Argentina, Chile, dan Brazil yang nilainya mendekati 250 poin. Menurut Juan Cassus, anggota tim dari the Latin American Laboratory for Evaluation and Quality of Education at UNESCO Santiago, prestasi tinggi Kuba dalam pendidikan ini merupakan hasil dari komitmen kuat pemerintahan Kuba, yang menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas teratas selama 40 tahun sesudah revolusi. Pemerintah Kuba memang mengalokasikan sekitar 6,7 persen dari GNP untuk sektor ini, dua kali lebih be-

sar dari anggaran pendidikan di seluruh negara Amerika Latin.²

Prestasi lain yang diraih pemerintah Kuba adalah di sektor kesehatan. Dari hanya 3.000 dokter setelah revolusi, sekarang Kuba mempunyai sekitar 64.000 tenaga dokter. Sistem pelayanan kesehatan di Kuba merupakan yang terbaik di seluruh Dunia Ketiga, di mana pemerintah mampu menyediakan layanan jasa kesehatan mulai dari rumah sakit, dokter, perawatan gigi dan perawatan bayi kepada 100 persen rakyat Kuba. Bahkan Kuba mampu mengirimkan tenaga kesehatan ke berbagai negeri jauh melampaui jumlah dokter yang dikirim oleh WHO (World Health Organization). Saat ini diperkirakan kurang lebih 2.000 tenaga medis dari Kuba

² Studi komparatif ini dikoordinasikan oleh Unesco's Regional Office for Education in Latin America and the Caribbean (UNESCO-OREALC). Adapun ke-13 negara yang di studi itu adalah Argentina, Bolivia, Brazil, Costa Rica, Kuba, Chile, Republik Dominica, Honduras, Meksiko, Paraguay, Peru, dan Venezuela. Lihat http://fcis.oise.utoronto.ca/~daniel_schugurensky/assignment1/1998cuba.html

bekerja di 57 negara. Tercatat 127 dokter dari Kuba dikirim ke Zimbabwe pada awal tahun ini untuk membantu program kesehatan di sana; 18 hingga 260 tenaga medis yang dikirim ke Haiti untuk membantu program rehabilitasi kesehatan bagi nelayan-nelayan di negara itu.³

Salah satu efek dari bagusnyanya pelayanan kesehatan ini adalah peningkatan usia hidup di Kuba, dari 55 tahun menjadi 76 tahun. Angka kematian bayi juga telah turun dari 60 per 1000 angka kelahiran menjadi 6,5 per 1000, yang merupakan angka terendah dari seluruh negara Dunia Ketiga dan lebih rendah dari negara industri maju sendiri. Bandingkan dengan tingkat rata-rata angka kematian bayi di Amerika Latin, yaitu 33 per 1000 dan di Amerika Serikat adalah 8 per 1000 angka kelahiran.

Di samping sistem pelayanan kesehatan

³ Perkembangan jumlah dokter yang dikirim sebagai misi kemanusiaan ke luar negeri ini, silakan baca di bab lain dari buku ini.

yang bagus, juga terdapat sukses besar dalam hal peningkatan gizi. Bahkan, menurut Juan Jose Leon Vega, Humas Departemen Pertanian Kuba, “Kuba saat ini merupakan negara yang memproduksi makanan paling bersih di dunia, bebas dari pupuk kimia, racun pestisida, dan zat kimia lainnya”. Di ibu kota Havana sendiri, terdapat kurang lebih 100.000 taman-taman berukuran kecil sampai sedang, yang mampu menyediakan kebutuhan sayuran bersih yang 100 persen organik, sedangkan total pertanian organik di seluruh Kuba sendiri adalah 1,5 juta hektare. Hal ini dimungkinkan karena di Departemen Pertanian Kuba, terdapat 140 orang doktor pertanian ditambah 10.000 tenaga insinyur pertanian.⁴

⁴ Hendri Kuok, “Si Hantu yang Ramah”, *Kritik Jurnal Pembaruan Sosialis*, Volume 2/Tahun 1 Agustus-September 2000, h. 37-58. Saat ini pemerintah Fidel Castro menjalin kerjasama dengan pemerintah Hugo Chavez dari Venezuela dalam bidang kesehatan, dimana Kuba mengekspor tenaga dokternya ke Venezuela. Sebagai imbalannya, Chavez mengekspor minyak ke Kuba. Lihat Deerick O’Keefe, “From

Bentuk Pemerintahan

Sebagai sebuah negara, Kuba berbentuk republik (Republic of Cuba atau Republica de Cuba). Namun bentuk pemerintahannya adalah *Communist State*. Seperti negara berbentuk republik lainnya, Kuba memiliki tiga cabang kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Cabang eksekutif terdiri dari kepala negara (*chief of state*) yang disebut presiden, kepala pemerintahan (*head of government*) yang disebut perdana menteri, dan kabinet yang disebut juga dengan nama dewan menteri (*council of ministers*). Adapun cabang legislatif disebut *Unicameral National Assembly of People's Power* atau *Asemblea Nacional del Poder Popular*. Dewan ini terdiri atas 609 kursi yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pada pemilu yang berlangsung pada Januari

Havana to Caracas and Beyond: The Spirit of Moncada Lives", Wednesday, Jul 27, 2005, <https://venezuelanalysis.com/analysis/1263?artno=1509>

2003, misalnya, jumlah partisipasi rakyat dalam pemilu mencapai 97,6 persen. Sedangkan cabang yudikatif terdiri atas *People's Supreme Court* atau *Tribunal Supremo Popular*. Di Kuba, presiden, wakil presiden dan para hakim lainnya dipilih oleh Dewan Nasional (*The National Assembly*).

Secara administratif pemerintahan, Kuba terdiri atas 14 provinsi, satu daerah istimewa dan 169 daerah tingkat II atau kota madya (*municipality*). Keempat belas provinsi itu adalah: Camaguey, Ciego de Avila, Cienfuegos, Ciudad de la Habana, Granma, Guantanamo, Holguin, Isla de la Juventud (yang merupakan daerah istimewa), La Habana (Havana), Las Tunas, Matanzas, Pinar del Rio, Sancti Spiritus, Santiago de Kuba, dan Vila Clara.

Demokrasi di Kuba

Ini lah isu yang paling kontroversial ketika membicarakan Kuba. Pertanyaan pertama

yang muncul adalah “apakah ada demokrasi di Kuba?” Pemerintah AS dengan tegas mengatakan bahwa *Cuba is the only non-democracy in the Western Hemisphere*. Dikatakan demikian karena, menurut Departemen Luar Negeri AS, pemerintahan Kuba adalah pemerintahan totaliter di mana kekuasaan terpusat pada individu Fidel Castro. Sederet jabatan memang dipegang oleh Castro: presiden dewan negara dan dewan menteri, sekretaris pertama Partai Komunis Kuba (PCC) dan komandan tertinggi angkatan bersenjata.

Ketidakdemokratisan Kuba semakin bertambah jika menggunakan kriteria pemisahan kekuasaan di antara tiga cabang kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif seperti yang lazim di negara-negara demokrasi liberal. Memang dalam Reformasi Konstitusi 1973, disebutkan bahwa Kuba tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan antara tiga cabang – eksekutif-legislatif-yudikatif, yang dinilainya me-

upakan sistem demokrasi borjuis. Kuba, sebaliknya, menganut penyatuan kekuasaan dimana kekuasaan yudikatif kedudukannya di bawah kekuasaan eksekutif. Dalam bahasa Castro dikatakannya:

“Di sini, kami tidak mereproduksi kekuasaan ala Montesquieu ... Di sini hanya ada satu kekuasaan, yakni kekuasaan rakyat dan kekuasaan revolusi yang performanya tampak dalam perbedaan fungsi. Dan fungsi-fungsi tersebut bersifat independen tapi bukan merupakan organ negara yang independen.”⁵

Dari pernyataan Castro ini secara tersurat kita melihat bahwa Kuba menganut sistem demokrasi yang tidak sama dengan sistem demokrasi liberal. Demokrasi model apa itu? Menurut Galvano della Volpe, ada dua aspek atau dua jiwa dalam demokrasi modern, yakni kebebasan mo-

⁵ Peter Roman, 2003, *People's Power Cuba's Experience with Representative Government*, Updated Edition, Rowman & Littlefield Publishers, INC USA, h. 71.

dern dan demokrasi dalam makna kebebasan sipil (politik) yang secara teoretis berhulu kepada John Locke, Montesquieu, Immanuel Kant, Wilhelm van Humbolt, dan Benjamin Constant. Jiwa kedua adalah kebebasan sosial (egalitarian) yang dilembagakan oleh sosial demokrasi dan secara teoretis bermula pada Jean-Jacques Rousseau dan lebih jelas tampak dalam karya-karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Lenin.⁶ Masih menurut Volpe, dua jiwa demokrasi modern ini saling berhadap-hadapan secara diametral: yang pertama lebih menekankan pada tuntutan akan kebebasan dalam makna kebebasan politik tanpa menghiraukan aspek keadilan, sementara yang kedua lebih menekankan pada tuntutan akan keadilan.

Bertolak dari kategorisasi Volpe ini, menurut Peter Roman, sistem demokrasi di Kuba berakar pada sistem demokrasi yang diperjuang-

⁶ Galvano della Volpe, 1976, *Rousseau and Marx and Other Writings*, Laurence and Wishart, London, h. 43

kan oleh Rousseau, Marx, Engels, dan Lenin. Jean Jacques Rousseau adalah seorang pemikir modern yang pertama kali dengan serius menyerang lembaga kepemilikan pribadi (*the institution of private property*). Bagi Rousseau, kepemilikan pribadi merupakan sumber ketidakadilan dalam masyarakat. Sebagai dampak dari pandangannya ini, Rousseau menolak konsep liberal mengenai keadilan di bawah hukum. Baginya konsep ini mengabaikan ketidakadilan ekonomi dan sosial yang bertumbuh subur dalam masyarakat sipil. Menurutnya konsep keadilan di bawah hukum menyebabkan yang kaya mengantongi hukum dalam sakunya, sementara yang miskin memilih roti ketimbang kebebasan. Padahal ketidakadilan sosial inilah yang menyebabkan demokrasi tidak bisa direalisasikan.

Paradoks antara kebebasan politik versus ketidakadilan ekonomi dan sosial ini diatasi Rousseau dengan mempromosikan persatuan antara masyarakat politik (*political society*) dan masya-

rakat sipil (*civil society*), yang disebutnya sebagai *mandate imperatif* atau model *instructed delegate*. Dari perspektif *mandate imperatif* ini, wakil rakyat harus bertanggung jawab kepada konstituennya dan sebaliknya, merupakan hak pemilih untuk me-*recall* atau memecat penguasa politik mereka. Dalam *The Contract Social*, Rousseau secara tegas mengatakan, rakyat “*can set them up and pull them down when it likes*”. Jadi menurut pandangan ini, kepentingan personal dari wakil rakyat tidak lagi relevan karena tugasnya adalah mempromosikan dan melindungi kehendak umum. Bagi Rousseau, kehendak umumlah yang lebih utama ketimbang kehendak orang per orang, yang dengan kasar disebutnya bahwa kepentingan tertentu merupakan musuh terbesar dari harmoni sosial. Model ini berakar pada pendapat Rousseau bahwa

persatuan melalui konsensus merupakan nilai primer dari demokrasi substansial.⁷

Hal senada dikemukakan Karl Marx, bahwa pemisahan kekuasaan antara masyarakat sipil dan masyarakat politik dalam demokrasi borjuis merupakan basis bagi pemisahan politik tanpa keadilan ekonomi. Dalam pemerintahan perwakilan, menurut Marx, pemisahan antara keduanya menyebabkan para wakil rakyat terisolasi dan terpisah dari pemilihnya. Dengan terisolasi dan terpisah pemilih dari wakilnya maka yang terjadi adalah penyerahan kedaulatan rakyat ke tangan yang mewakilinya. Padahal, seperti kata Rousseau, *"The deputies of the people are not and cannot be its representative: they are merely its stewards."*⁸ Di bagian lain

⁷ Lihat Coen Husain Pontoh, *Jean-Jacques Rousseau*, <https://coenpontoh.wordpress.com/2005/08/17/jean-jacques-rousseau/>

⁸ *Ibid*

ia mengatakan, :....*sovereignty cannot be represented.*" Selanjutnya kata Marx,

"Para wakil masyarakat sipil adalah sebuah masyarakat yang tidak terkoneksi dengan pemilihnya melalui segala bentuk "instruksi" atau "wenang". Mereka memiliki kekuasaan sebagai perwakilan urusan-urusan publik, namun dalam kenyataannya mereka mewakili kepentingan tertentu."⁹

Sebagai alternatif dari demokrasi borjuis, pada 1843 Marx memperkenalkan sosialisme sebagai basis bagi pelaksanaan demokrasi sejati. "Hanya melalui sosialisme", demikian tulis Marx, "pemisahan antara masyarakat sipil dan masyarakat politik dalam demokrasi modern bisa diselesaikan". Sebagian Marxis menyebut sosialisme sebagai demokrasi langsung, di mana, seperti kata Lenin, demokrasi langsung berarti demokrasi dengan kontrol dari bawah. Konse-

⁹ Roman, *op.cit.*, h. 17.

kuensi dari konsep ini, menurut Lenin, “lembaga perwakilan tetap perlu, tetapi ini bukanlah parlementarisme sebagai sebuah sistem yang khusus, sebagai pemisahan kerja antara legislatif dan eksekutif, sebagai posisi istimewa bagi para wakil.¹⁰ Penekanan terhadap parlementarisme ini penting, karena, menurut Marx, dalam sistem demokrasi liberal-borjuis parlementarisme hanya menjadi organ umum yang mengorganisir kepentingan kelas borjuasi, jaminan politik dan bentuk-bentuk serta ekspresi-ekspresi dari kekuasaan mereka, dalam makna ini, parlementarisme bukanlah ekspresi nyata dari kekuasaan kelas berkuasa (*the ruling class*).

Berdasarkan teori yang dikembangkan Rousseau dan Marx, Roman menyimpulkan beberapa hal berikut yang memengaruhi dan membentuk sistem demokrasi di Kuba: pertama, penekanan pada aspek keadilan dari segi eko-

¹⁰ Lenin, “State and Revolution”, *Selected Work*, Vol, II, h. 302.

nomi, sosial, dan politik; kedua, persatuan antara masyarakat sipil dan masyarakat politik; ketiga, pemerintahan perwakilan yang berdasarkan pada mandat imperatif; keempat, kekuasaan dan kontrol oleh kelas pekerja; kelima, kebutuhan akan struktur negara yang baru; dan keenam, terbentuknya negara yang non-politik.

Pemilu Kuba

Ketika meraih kekuasaan dari tangan diktator Fulgencio Batista yang mendapatkan dukungan penuh dari AS pada 1959, pemerintahan baru yang dipimpin oleh Fidel Castro Ruz dihadapkan pada tugas utama untuk mengganti model negara lama dengan negara baru yang sesuai dengan cita-cita revolusioner mereka. Ini bukan pekerjaan yang mudah karena pertama, tidak seperti revolusi sosialis lainnya di dunia, revolusi Kuba ini dilakukan tanpa adanya sebuah partai pelopor, tanpa adanya koherensi ideologi yang terartikulasi dengan solid dan

kemampuan militer yang sangat sederhana. Yang kedua, para revolusioner itu tidak memiliki struktur politik yang permanen yang bisa dijadikan lokomotif untuk menarik gerbong revolusi lebih jauh. William LeoGrande menyebut pemerintahan pada saat itu sebagai “pemerintahan gerilya” yang ditandai oleh sifatnya yang tidak terorganisasi, kacau, disertai dengan sedikit sekali kontrol formal.¹¹

Baru setelah tahun 1961, setahap demi setahap bentuk pemerintahan revolusioner Kuba semakin tampak. Pada masa-masa ini, konsep demokrasi langsung mulai diujicobakan, di mana menurut LeoGrande, konsep ini berdasarkan pada definisi bahwa partisipasi politik bermakna dukungan aktif mayoritas warga negara. Dukungan itu termanifestasi dalam wujud mobilisasi massa untuk menerapkan kebijakan-kebijakan, yang menurut pemerintah,

¹¹ Roman, *op.cit.*, h. 63.

untuk melayani kepentingan rakyat dan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional yang diidentifikasi oleh para pemimpin. Dalam pandangan Haroldo Diaz Alfonso, seorang sosiolog Kuba, praktik demokrasi langsung pada periode ini merupakan bagian dari pembangunan budaya politik baru, yakni menghubungkan partisipasi rakyat dengan pertahanan militer atas revolusi dan kedaulatan nasional, serta mobilisasi massa untuk mempromosikan pembangunan ekonomi.

Sebagai wujud nyata pembangunan partisipasi rakyat yang aktif dan meluas, pada akhir 1961 hingga 1965, pemerintah mendirikan pemerintahan lokal yang dinamai The Coordination, Operation, dan Inspections Board (*Juntas de Coordinacion, Ejecucion e Inspeccion* atau JUCEI). Komposisi lembaga ini terdiri atas organisasi politik dan massa, dan dari aparat pemerintah pusat yang mengoordinasikan seluruh aktivitas ekonomi dan sosial. Lembaga ini, wa-

laupun bertujuan menggalang partisipasi rakyat, sepenuhnya berada di bawah kontrol pemerintahan revolusioner. Namun keberadaan lembaga ini tidak bertahan lama. Akibat kelemahan struktural yang fatal, pada 1966 lembaga ini diganti dengan lembaga baru yang disebut Kekuasaan Lokal (Local Power atau Poder Local). Lembaga baru ini bertahan hingga terbentuknya the Organs of People's Power (OPP) pada pertengahan 1970an.

Kekuasaan lokal ini memiliki dua basis objektif: pertama, desentralisasi yang signifikan bagi otoritas pemerintahan lokal agar lebih responsif pada kebutuhan dan kondisi-kondisi lokal; kedua, peningkatan besar-besaran partisipasi rakyat dalam pemerintahan lokal. Peningkatan partisipasi ini bermakna ganda, yakni dukungan rakyat yang besar terhadap penerapan kebijakan dan masukan dari rakyat bagi pembuatan kebijakan.

Asal-muasal pemilihan kepala daerah di Ku-

ba dapat dilacak di sini. Dalam badan Kekuasaan Lokal ini duduk para delegasi yang dipilih dari lingkungan dan tempat kerja. Para kandidat yang akan duduk dalam badan ini dinominasikan secara langsung oleh para pemilih yang hadir dalam pertemuan di lingkungan dan tempat kerja, tanpa intervensi dari Partai Komunis Kuba (Partido Comunista de Cuba/PCC). Bukan berarti partai tidak menominasikan kandidatnya, tetapi kandidat yang dinominasikan oleh PCC tidak selalu menang. Para delegasi ini dipilih dengan cara mengacungkan jari tangannya. Setiap kota madya memiliki sepuluh orang delegasi hasil pemilihan, dua sekretaris dan satu orang presiden yang dipilih melalui inti lokal PCC.

Mengikuti tradisi *mandat imperatif* yang diteorikan Rousseau, para wakil terpilih ini meminta bertemu dengan konstituen setiap enam bulan sekali. Peristiwa ini disebut Laporan kepada Dewan Rakyat. Pertemuan dua kali setahun dengan konstituen ini, menurut Domingo Gar-

cia Cardenas, bertujuan untuk “menyatukan ke dalam realisasi kerja pemerintahan lokal seperti pembangunan pusat-pusat pelayanan, kebersihan kota dan tindakan-tindakan lainnya.”¹²

Namun sesungguhnya Kekuasaan Lokal ini hanya memiliki sedikit kekuasaan nyata (*real power*) untuk merealisasikan program-programnya. Salah satu penyebabnya adalah menguatnya arus balik kekuasaan aparatus pusat dan PCC. Terjadi apa yang disebut sentralisasi birokrasi, sehingga menyebabkan mobilisasi rakyat melemah. Akibatnya Kekuasaan Lokal gagal dalam memenuhi tujuan-tujuan desentralisasi administratif. Situasi ini digambarkan oleh Carolee Bengelsdorf sebagai “vertikalisasi kekuasaan politik, terisolasinya para pembuat kebijakan di pusat dan rakyat yang berada di luar pinggiran struktur kekuasaan”.¹³

¹² Ibid., h. 63

¹³ Ibid., h. 67

Keadaan ini bukan tidak disadari oleh para pemimpin Kuba, terutama Fidel Castro. Dalam salah satu pidatonya ia mengatakan, “Partai bukanlah pelaksana administratif. Partai adalah pemandu, penggerak, pendukung dan penjamin terpenuhinya rencana-rencana kepemimpinan revolusioner dalam setiap area”. Sebagai jalan keluarnya, Castro mengatakan perlunya sebuah struktur politik baru untuk mengoordinasikan produksi sosial. Katanya “Kita tidak sedang mengusahakan solusi-solusi yang bersifat *magic*. Kita akui bahwa kita menghadapi masalah dan kita katakan bahwa ‘hanya rakyat, hanya dengan rakyat – kesadaran (*awareness*) rakyat terhadap masalah kita, informasi dari rakyat, petunjuk-petunjuk dari rakyat – maka masalah-masalah tersebut bisa kita selesaikan”.¹⁴

Hasil dari kritisisme-diri sendiri (*self-criticism*) atau autokritik itu, Castro kemudian mem-

¹⁴ Ibid., h. 68

perkenalkan konsep Lenin tentang “Subordinasi Ganda”: pertama, aturan umum datang dari pusat tetapi administrasinya ada di level lokal. Kedua, desentralisasi manajemen berdasarkan inisiatif dari organisasi-organisasi massa dan serikat buruh yang menjadi “titik tolak” bagi terciptanya “kemajuan-kemajuan yang nyata, bentuk-bentuk kehidupan sosial politik yang non-birokratis”. Tahapan-tahapan selanjutnya adalah pendeklarasian konsep pemerintahan tunggal yang tidak mengenal pemisahan cabang kekuasaan. Konsep ini kemudian menjadi bagian dari Konstitusi 1976. Pada waktu bersamaan, aparatus partai dimodifikasi, peran dan tanggung jawabnya didefinisikan ulang, khususnya dalam hubungannya dengan negara. Sementara itu, pada Kongres ke-13 Central de Trabajadores de Cuba (Federation of Cuban Workers/ CTC), menghasilkan keputusan untuk semakin memperkuat posisi CTC sebagai pembela hak-hak pekerja, serta memberikan hak suara yang

sangat besar kepada pekerja untuk mengelola masalah ekonomi. Demikian juga dengan yang berlangsung di The Federation of Cuban Women, the Small Farmers' National Organization, dan the Committees for the Defense of the Revolution yang mendorong para anggotanya untuk merekomendasikan serangkaian kebijakan kepada pemerintah pusat.¹⁵

Pemilu Anggota Dewan Kota ***(The Municipal Assembly)***

Bercermin pada kelemahan yang muncul dalam Kekuasaan Lokal, pemerintah Kuba kemudian menyiapkan sebuah model pemilihan yang bertumpu pada konsep Demokrasi Langsung. Untuk itu, dibuatlah sebuah proyek percontohan di Kota madya Cardenas, Provinsi Matanzas. Sebuah tim kemudian dibentuk untuk melakukan studi mengenai pemerintahan

¹⁵ Lihat http://www.countriesquest.com/caribbean/cuba/history/cuba_under_castro/political_and_economic_changes_in_the_1970s.htm

lokal baik di negara kapitalis maupun di negara sosialis. Hasil studi tersebut kemudian menjadi kerangka kerja bagi Constitution of Organs of People's Power/OPP, yang selanjutnya menjadi dokumen dasar dalam pelaksanaan pemilu di Matanzas pada Juni dan Juli 1974. Dalam dokumen yang kemudian menjadi karakteristik organ kekuasaan rakyat (OPP) itu, beberapa prinsip berikut melekat pada pemilu di Kuba: *langsung, pemilihan yang kompetitif untuk anggota dewan, pemilihan tidak langsung bagi badan perwakilan tertinggi, tidak ada kampanye bagi pejabat, anggota dewan kota madya bertemu secara periodik dengan pemilihnya untuk menerima dan menjawab mandat, prosedur recall (pencopotan) yang dilakukan secara mendadak, dan anggota dewan merupakan sukarelawan yang tidak dibayar.*

Hasil dari pelaksanaan proyek percontohan itu, menurut laporan harian *The Wall Street Journal* yang berbasis di New York, AS, berlang-

sung secara kompetitif dan rahasia. Para kandidat anggota dewan dinominasikan oleh kelompok-kelompok rukun warga tanpa campur tangan dari Partai Komunis Kuba (PCC). Selanjutnya, para anggota dewan kota madya ini memilih delegasi yang akan duduk dalam lembaga yang lebih tinggi. Masih menurut *The Wall Street Journal*, pemilu Matanzas itu telah menempatkan kekuasaan politik dan ekonomi ke tangan para pemilih Kuba yang berpotensi untuk meningkatkan desentralisasi dan efisiensi ekonomi.¹⁶ Menurut LeoGrande, pemilu Matanzas itu memperteguh konsep demokrasi langsung yang sudah mulai diterapkan sejak tahun 1960an yang ditandai oleh sejumlah ciri: (1) esensi demokrasi adalah mengusahakan kebijakan yang melayani kepentingan rakyat; (2) demokrasi menerima dukungan aktif rakyat melalui partisipasi langsung dalam penerapan kebijakan publik; (3) pertemuan langsung seca-

¹⁶ Op.cit., h. 70

ra informal, hubungan non-kelembagaan antara rakyat dengan para pemimpin mereka dibutuhkan untuk menjamin tanggung jawab pemerintahan akan kebutuhan dan tuntutan rakyat.

Secara teoretis, proyek percontohan Matanzas ini merevisi konsepsi Lenin tentang prinsip Subordinasi Ganda (*principle of dual subordination*) yang dikukuhkan dalam pasal 68 Konstitusi 1992.¹⁷ Revisi terhadap prinsip ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi kota madya, khususnya dalam hubungannya dengan pemerintahan provinsi. Salah satu alasan untuk mengurangi kekuasaan pemerintahan provinsi

¹⁷ Ibid., h. 71. Menurut konsep ini, setiap organ administratif lokal posisinya subordinat terhadap pemerintahan lokal dan berhubungan dengan kementerian pemerintahan pusat. Sebagai contoh, jika departemen pendidikan pemerintahan lokal ingin membangun sekolah dasar, mereka harus berkonsultasi dengan dewan kota dan juga dengan dewan kementerian pendidikan mengenai kebijakan umum bidang pendidikan. Prinsip subordinasi memberikan desentralisasi administratif yang sangat besar kepada pemerintahan lokal, namun norma, prosedur, dan metode tetap menjadi kewenangan pemerintahan pusat.

adalah untuk mempersempit jarak antara pemerintahan lokal dengan konstituen, dan selanjutnya terbangun partisipasi warga lokal yang menyeluruh. Secara programatik hal ini dituangkan dalam mekanisme perencanaan ekonomi baru yang disebut *System of Management and Planning of the Economy (Sistema de Dirección y Planificación de la Economizan/SDPE)*.

Dari proyek percontohan Matanzas ini pula, kini di Kuba kita kenal dua tipe pemilihan umum: pertama, *Partial Election* (Pemilihan terbatas) untuk memilih delegasi ke Dewan Kota madya (Municipal Assemblies). Pemilihan ini berlangsung setiap dua setengah tahun sekali; kedua, *General Election* (Pemilihan Umum) yang berlangsung setiap lima tahun sekali. Pemilu ini adalah gabungan dari Pemilihan terbatas, pemilihan untuk delegasi ke Dewan Provinsi (Provincial Assemblies) dan pemilihan untuk wakil-wakil (*deputies*) Dewan Nasional (National Assembly). Mereka-mereka yang terpilih

ini kemudian duduk sebagai anggota perwakilan dari Dewan Nasional Kekuasaan Rakyat (the National Assembly of People's Power) yang merupakan lembaga perwakilan politik (parlemen), yang terdiri dari Dewan Kota madya, Provinsi dan nasional.¹⁸

Bagian selanjutnya dari artikel ini akan membahas pemilu anggota dewan kota madya.

Status dan Peran Dewan Kota Madya

Berdasarkan Konstitusi Kuba, Dewan Kota tidak memiliki kekuatan legislatif. Tugasnya adalah menganalisis, mendiskusikan, menyupervisi, memonitor, menginspeksi dan mengontrol masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, dan hukum di wilayah kota madya. Tugas lainnya adalah memilih para administrator untuk perusahaan-perusahaan lokal dan entitas (seperti

¹⁸ Yisel Martinez, 2018, "How do elections work in Cuba?", <http://en.granma.cu/cuba/2018-02-20/how-do-elections-work-in-cuba>

pertokoan dan poliklinik) dan berpartisipasi dalam memformulasikan anggaran dan perencanaan ekonomi kota madya yang mesti disetujui. Peran penting lainnya yang dimiliki oleh Dewan Kota adalah memonitor kinerja dari perusahaan-perusahaan level dan nasional yang berkedudukan di kota madya.

Menurut Charles McKelvey, profesor sosiologi di Presbyterian College, Dewan Kota ini memilih kepala eksekutif kota madya dari kalangan anggota Dewan Kota tersebut (dengan demikian tidak ada pemilihan kepala daerah yang terpisah). Selain itu, Dewan Kota juga memilih komisi pemilihan umum, yang selanjutnya mendaftar para kandidat yang akan duduk di Dewan Provinsi. Daftar kandidat ini kemudian akan diverifikasi oleh pemilih di tingkat provinsi.¹⁹

¹⁹ Charles McKelvey, "The Myth of Cuban Dictatorship", dalam <http://www.quaylargo.com/Productions/McKelvey.html/>

Dewan kota ini juga memilih presiden, wakil presiden dan sekretaris Dewan Kota. Berdasarkan ketetapan Komisi Dewan Nasional mengenai Organ Lokal Kekuasaan Rakyat (Local Organs of People's Power), di bawah tajuk tanggung jawab dan kerja-kerja delegasi Dewan Kota pada Mei 1999, disebutkan: (1) menjadi saluran bagi kebutuhan, kesulitan dan kepedulian konstituen; (2) menginformasikan kepada konstituen tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Dewan Kota; (3) bersama-sama dengan partisipasi massa mencari solusi atas masalah yang timbul; (4) mengadakan sesi pertanggungjawaban kepada konstituen dua kali dalam setahun; (6) mengadakan pertemuan secara periodik dengan perwakilan PCC, organisasi-organisasi massa, dan kelompok-kelompok profesional; (7) mengantisipasi masalah pengangguran, sukarelawan, orang tua tunggal, kelompok-kelompok yang kurang beruntung, kebutuhan keluarga, kriminal, prostitusi, dan juga

terlibat dalam soal-soal yang bersifat negatif; (8) mengunjungi distrik-distrik pemilihan, berkunjung ke rumah-rumah, tempat kerja, organisasi; (9) berpartisipasi dalam Dewan Rakyat; (10) berpartisipasi dalam sesi Dewan Kota dan komisi-komisi; (11) menyupervisi pusat-pusat produksi dan pelayanan; dan (12) berpartisipasi dalam pengambilan keputusan Dewan Kota mengenai kontrol atas pelanggaran distribusi bahan-bahan bangunan, telepon, perumahan, pembangunan lot, produk-produk konsumen, dan hak untuk makan di restoran yang layak.²⁰

Keanggotaan Dewan Kota Madya

Delegasi Dewan Kota Madya merupakan perwakilan dari pemilu distrik, dengan jumlah pemilih diperkirakan mencapai 1.500 orang. Setiap distrik mendapat jatah dua kandidat untuk berlaga dalam pemilu. Jumlah distrik untuk setiap kota madya (di Kuba diperkirakan setiap

²⁰ Op.cit., h. 76.

kota madya memiliki 30 distrik) disesuaikan setiap dua setengah tahun sebelum setiap kali dilangsungkannya pemilu.

Yang menarik, tidak seperti praktik di bekas Uni Sovyet, kandidat delegasi Dewan Kota dinominasikan secara langsung oleh pemilih dari setiap distrik pemilihan. Tidak ada campur tangan partai dalam penentuan kandidat ini. Peran partai dalam nominasi dan prosedur pemilu dilakukan melalui komisi pemilu lokal: mobilisasi sumber daya, koordinasi dan menjamin kebenaran usulan dari para pemilih demi tegaknya norma-norma dan penghormatan terhadap keinginan-keinginan pemilih. Namun demikian, seperti dikatakan Esteban Lazo, sekretaris pertama PCC di Havana, tanpa adanya kandidat yang dinominasikan oleh partai atau dikampanyekan oleh partai, lebih dari 80 persen dari para nominator adalah kader partai atau kader serikat pemuda komunis. Para anggota terpilih ini duduk sebagai anggota dewan selama dua setengah ta-

hun dan bisa dipilih kembali tanpa batas waktu tertentu.

Tahap-tahap Pemilihan Anggota Dewan Kota

A. Nominasi dan Kandidasi

Penominasian kandidat yang diusulkan sebagai anggota Dewan Kota, dilakukan sebulan sebelum pelaksanaan pemilu. Penominasian dilakukan di tingkat subdivisi dalam distrik pemilihan yang disebut *areas*. Dalam setiap distrik terdapat delapan area, tergantung pada besaran populasi. Mereka yang berhasil meraih 50 persen suara atau lebih, berhak untuk ikut dalam pemilu distrik.

Penominasian ini bertempat di kantor Komisi Pemilu Lokal. Hanya mereka yang berhak memilih yang bisa menominasikan kandidat. Demikian pula, hanya mereka yang berhak dipilih yang bisa dinominasikan sebagai kandidat. Pemilih tidak bisa menominasikan dirinya sendiri

sebagai kandidat, dan tidak ada partai atau organisasi yang boleh mengusulkan atau memublikasikan dukungannya bagi para kandidat. Mereka yang berhak memilih dan dipilih adalah yang berumur di atas 16 tahun, tidak sedang menderita cacat mental, atau kehilangan hak-hak politiknya, atau yang sedang berada di penjara.

Individu yang mengusulkan kandidat diwajibkan untuk memberikan alasan-alasan mengapa ia mengusulkan kandidat tersebut. Dengan mekanisme ini maka antara konstituen dan wakilnya terdapat hubungan yang erat, saling kenal prestasi dan reputasi masing-masing. Dengan mekanisme ini maka bisa dikatakan proses pemilu di Kuba bukan sebuah proses politik. Tidak ada kampanye dari para kandidat tentang program dan janji-janji terhadap konstituen jika mereka menang kelak. Sebabnya, karena para kandidat dicalonkan dan dipilih sendiri oleh konstituen. Tidak ada pengerahan massa, tidak juga membutuhkan biaya yang sangat besar se-

perti yang terjadi dalam pemilu di negara-negara yang menganut sistem demokrasi liberal.

B. Tahap Pemilihan

Pelaksanaan pemilu di Kuba dilaksanakan oleh sebuah badan yang disebut Komisi Pemilihan Umum Nasional (National Electoral Commission). Pada tingkat distrik disebut Komisi Pemilihan Umum Distrik. Anggota komisi ini sebanyak lima orang yang bertempat tinggal di distrik tersebut dan bekerja tanpa dibayar.

Tiga bulan sebelum pelaksanaan pemilu, komite pertahanan revolusi (Committees for the Defense of the Revolution/CDR), menyerahkan kepada KPU daftar nama-nama yang berhak memilih. Komisi juga mempersiapkan pertemuan untuk nominasi, memverifikasi nama-nama kandidat yang diusulkan, mempersiapkan tempat pemilu, dan menginformasikan kepada publik di mana lokasi mereka memilih, dan perhitungan suara.

Setelah pertemuan nominasi, KPU kemudian menulis dan mencetak biografi singkat para kandidat di setiap distrik pemilihan, dan dua minggu sebelum hari H pelaksanaan pemilu, menyebarkan foto-foto para kandidat di tempat-tempat umum, di papan buletin CDR, dan di depan tempat pelaksanaan pemilu. Biografi singkat itu memuat antara lain: nama, umur, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, dan “keterlibatan dalam revolusi” (yang maknanya keanggotaan dalam partai, atau pemuda komunis, organisasi-organisasi massa dan militer). Penyebaran biografi ini penting karena tidak semua orang mengenal detail kandidat yang dinominasikan, walaupun telah ada proses penominasian sebelumnya.

Penyebaran biografi ini bukan tanpa kritik. Pencantuman poin “keterlibatan dalam revolusi” dianggap sebagai bagian dari metode pemerintahan Kuba untuk menyeleksi dan kemudian membatalkan setiap kandidat yang diusulkan.

Sebab di Kuba hanya ada satu partai. Dengan demikian, pemilu dianggap sekadar akal-akalan pemerintah terhadap proses penindasan politik selama ini. Terhadap kritik ini, hasil studi Peter Roman menunjukkan hal sebaliknya, keanggotaan seseorang dalam partai bukanlah faktor utama yang mendorong pemilih untuk memberikan suaranya. Sebagai contoh, pada 1988, Carlos Walfrido Rodriguez, seorang lelaki kulit hitam dan bukan anggota partai, terpilih untuk kedua kalinya dalam pemilihan di distrik Miramar seksi Playa. Rodriguez adalah anggota Dewan Kota madya, anggota Dewan Provinsi, dan anggota Profesional Komite Eksekutif Dewan Kota madya. Pada pemilu itu, Rodriguez unggul kandidat yang menjadi anggota partai. Rodriguez baru menjadi anggota partai pada awal 1990.²¹

Setelah proses ini selesai, proses selanjutnya

²¹ Ibid., h. 119.120.

adalah pemungutan dan penghitungan suara. Sejak pelaksanaan pemilu Kota madya yang pertama pada 1976, keterlibatan rakyat Kuba dalam pemilu selalu di atas angka 95 persen. Pada Oktober 1986, 97,7 persen pemilih yang berhak memilih menggunakan hak konstitusionalnya ini untuk memilih 12.623 anggota Dewan Kota madya. Pada 30 April 1989, 98,3 persen pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memilih 13.815 anggota Dewan Kota madya. Dan pada 9 Juli 1995, dari 7,568,548 warga negara yang tercatat memiliki hak suara sebesar 97,1 persen. Dari jumlah itu, 97,7 persen memilih 14.229 anggota. Selama masa pemungutan suara ini, 11,3 persen kotak suara dinyatakan tidak sah; sekitar 4,3 persen ditemukan blangko kosong, dan 7 persen suara dinyatakan batal. Selama pelaksanaan pemilu, sebanyak 50,8 persen kandidat yang masih menjabat (*incumbent candidate*) tidak terpilih kembali, 40,2 persen dari presiden Dewan Kota madya yang masih men-

jabat tidak terpilih kembali dan dari 61,5 persen wakil presiden juga tidak terpilih kembali.

Jumlah perempuan yang terpilih meningkat dari 13,55 persen pada 1992, menjadi 15,43 persen. Hanya 6,8 persen dari mereka yang terpilih itu berhasil dipilih sebagai presiden dan wakil presiden Dewan Kota madya.

Selanjutnya, pada pemilu 1997, 97,59 persen dari pemilih yang berhak memilih menggunakan hak pilihnya memilih 14.533 anggota Dewan Kota madya, meningkat dari 97,1 persen pada pemilu 1995. Selama penghitungan suara, 7,21 persen dari kotak suara kosong atau dibatalkan, turun dari 11,3 persen pada 1995. Pada pemilu putaran kedua pada 26 Oktober, dari 1,098 distrik tidak ada kandidat yang meraih suara mayoritas, dari 94,77 persen suara yang masuk. Bandingkan dengan 89,2 persen pada pemilu 1995. Mereka yang menang, 49,5 persen adalah yang masih menjabat, 17 persen perempuan, 12,5 persen berumur di bawah 50

tahun, 76,18 persen adalah anggota PCC, 31,4 persen adalah lulusan universitas, dan 7,21 persen bukan anggota PCC. Mewakili sektor-sektor dalam masyarakat Kuba, para delegasi yang terpilih 2.265 adalah buruh, 2.649 adalah teknisi, 1.426 adalah pekerja administratif, 441 adalah karyawan di sektor jasa, 5.388 adalah manajer, 10 mahasiswa, 380 tentara, 453 adalah karyawan kementerian tenaga kerja, 624 adalah mereka yang berhenti dari pekerjaannya atau pensiunan, 170 adalah ibu rumah tangga, 64 adalah pekerja mandiri, 575 adalah petani, dan 88 adalah mereka yang memiliki pekerjaan sampingan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang bisa diambil kesimpulan dari pelaksanaan pemilu di Kuba:

Pertama, tudingan atau tuduhan bahwa sosialisme bertentangan demokrasi adalah salah.

Justu yang terjadi, sosialisme berusaha membawa kembali demokrasi pada maknanya yang sebenarnya: kekuasaan rakyat. Metodenya adalah dengan terus berusaha mendekatkan proses pengambilan keputusan menyangkut hajat hidup di tangan rakyat. Selama ini demokrasi yang kita kenal dan berlaku adalah demokrasi yang dikuasai dan dijalankan oleh elite di mana rakyat hanya menjadi peserta penggembira setiap periode penyelenggaraan pemilu.

Kedua, pemilu Kuba berlangsung secara aktif, reguler, dan rahasia, dengan partisipasi rakyat yang penuh dan nyata. Tidak seperti di Indonesia, di mana para kandidat diseleksi dan ditetapkan oleh partai, di Kuba para kandidat diseleksi dan ditetapkan oleh rakyat yang berhak memilih.

Ketiga, di Kuba para anggota dewan bekerja secara sukarela. Mereka tidak dibayar atas kerja-kerja mereka sebagai wakil rakyat. Mereka memperoleh pendapatan dari tempat mere-

ka bekerja sehari-hari. Jadi jika semula seorang anggota dewan adalah pegawai bank, maka ketika menjadi anggota dewan ia tidak meninggalkan pekerjaannya sebagai pegawai bank dan menerima gaji seperti biasanya.²² Hal ini menyebabkan posisi atau jabatan sebagai anggota dewan bukan sebuah keistimewaan, posisi itu adalah sebuah pengabdian, bukan karier politik. ***

Artikel ini sebelumnya telah dimuat di *Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, edisi 21. Tahun 2005, Insist Press, Yogyakarta. Untuk kepentingan buku saku ini, saya memberitakan tambahan informasi dan data untuk artikel ini.

Daftar Pustaka

Griffiths, John and Peter Griffiths, 1979, *Cuba: The Second Decade*, London: Writers and

²² Martinez, op.cit

Readers Publishing Cooperative.

Kuok, Hendri, "Sosialisme di Hantu yang Ramah", *Kritik Jurnal Pembaruan Sosialis*, Volume 2/Tahun 1, Agustus-September, 2000.

Lenin, *State and Revolution*, Selected Works, Vol. II.

Martinez, Yisel, 2018, "How do elections work in Cuba?", <http://en.granma.cu/cuba/2018-02-20/how-do-elections-work-in-cuba>

McKelvey, Charles, "The Myth of Cuban Dictatorship", dalam <http://www.quaylargo.com/Productions/McCelvey.html/>

O'Keefe, Deerick, "From Havana to Caracas and Beyond: The Spirit of Moncada Lives", Wednesday, Jul 27, 2005, <https://venezuelanalysis.com/analysis/1263?artno=1509>

Pontoh, Coen Husain, *Jean-Jacques Rousseau*, <https://coenpontoh.wordpress.com/2005/08/17/jean-jacques-rousseau/>

Roman, Peter, 2003, *People's Power Cuba's Experience with Representative Government*, Updated Edition, Rowman & Littlefield Publishers, INC USA, h. 71.

Volpe, Galvano della, 1976, *Rousseau and Marx and Other Writings*, Laurence and Wishart, London, h. 43.

http://fcis.oise.utoronto.ca/~daniel_schuguren-sky/assignment1/1998cuba.html

http://www.countriesquest.com/caribbean/cuba/history/cuba_under_castro/political_and_economic_changes_in_the_1970s.htm

Bab II

Kesehatan Buat Semua

— Belajar Pada Kuba —

KETIKA gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta (2012), Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, meluncurkan kebijakan Kartu Jakarta Sehat (KJS), bersamaan dengannya, keraguan, sinisme, dan kritik segera muncul. ‘Mana mungkin kebijakan ini sanggup direalisasikan? Jakarta yang besar dan kompleks bukan Solo yang kecil dan kurang kompleks.’ ‘Ah, ini kebijakan untuk pencitraan, sekadar untuk menunjukkan pada pemilihnya bahwa Jokowi-Ahok sanggup merealisasikan janji-janji masa kampa-

nyenya.’ ‘Ini kebijakan yang terburu-buru karena segala fasilitas infrastruktur dan sumber daya manusianya sangat terbatas.’ ‘Aturan mainnya seperti apa, dari mana dananya, kok asal bikin kebijakan populis?’

Tentu saja ada lebih banyak yang mendukung diluncurkannya program KJS itu. Dalam perjalanannya, tampak bahwa KJS ini berlangsung secara tertatih-tatih, kurang persiapan, seperti program uji-coba saja. Dan ketika jumlah pasien membludak berkali lipat, melebihi kapasitas jumlah rumah sakit dan tenaga medis, segala kritik dan sinisme itu seperti memperoleh pembenaran empirisnya. Belum lagi ditambah persoalan pembiayaan program serta fasilitas penunjang kesehatan yang masih kedodoran di sana-sini, semakin benarlah kritik itu. Puncaknya ketika terjadi kasus kematian beberapa pasien karena ditolak rumah sakit dan mundurnya sebagian rumah sakit swasta dari program ini.

Tuntutan agar kebijakan KJS ditinjau kem-

bali semakin mengemuka. Politisi di parlemen bahkan mengemukakan gagasan untuk *impeachment* terhadap Jokowi-Ahok. Tapi, pemerintah daerah DKI Jakarta bersikukuh untuk terus melanjutkan program KJS. Baik Jokowi dan Ahok berpendapat bahwa bukan KJS-nya yang salah, tapi perbaikan-perbaikan fasilitas infrastruktur kesehatan dan tenaga medis yang mesti dilakukan. Seperti dikatakan Dien Emmawati, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, 'Upaya mengatasi itu banyak yang telah dan akan kita lakukan. Ada penambahan dokter, fasilitas juga kita perbanyak.'¹

Harus diakui bahwa kebijakan Jokowi-Ahok soal KJS yang melayani sekitar 4,7 juta jiwa penduduk miskin dan rentan miskin di Jakarta, adalah kebijakan yang sangat berani. Dengan sistem kesehatan nasional yang sangat berorientasi

¹ <http://nusantara.rmol.co/read/2013/04/01/104642/Jokowi-Diminta-Bijak-Sikap-Kritik-KJS-Yang-Dicap-Gagal->, diunduh pada 2 April, 2013.

pasar, jumlah tenaga medis yang sangat terbatas, dengan mayoritas di antaranya sangat berorientasi *profit*, serta infrastruktur kesehatan dan fasilitas penunjang yang minim, maka program KJS ini seperti kebijakan bunuh diri. Jika gagal, maka KJS ini hanya akan menambah panjang daftar buruk kebijakan-kebijakan yang berorientasi kerakyatan, dan lebih dari itu, menguatkan doktrin yang telah tiga dekade lebih bercokol di kepala para pengambil kebijakan, intelektual arus utama, dan teknokrat bahwa 'tak ada lagi alternatif' di luar kebijakan kapitalisme-neoliberal.

Tapi, benarkah tak ada lagi alternatif? Tiga buku yang di-review di sini menunjukkan bahwa alternatif itu tetap ada. Dari tiga buku yang membahas soal sistem kesehatan Kuba, sebuah negara kepulauan kecil yang berideologi sosialis di kawasan Karibia, alternatif itu bukan hanya ada tapi juga sangat baik.

Prestasi Sistem Kesehatan Kuba

Apa menariknya atau apa prestasi yang patut dibanggakan dari sistem kesehatan Kuba? Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa UNICEF dan Pan American Health Organization (PAHO) memberikan jawabannya: 'sistem kesehatan masyarakat Kuba adalah yang terbaik di hampir seluruh negara berkembang dan dalam banyak hal, bahkan lebih baik dari banyak negara industri. Kuba, misalnya, menyediakan akses kesehatan kepada 98 persen penduduknya, jumlah yang mengalahkan level Amerika Serikat (AS) dan seluruh negara Amerika Latin. Tidak itu saja, 95 persen penduduk Kuba dikunjungi oleh dokter dan perawat yang tinggal dan melayani kebutuhan masyarakat di sekitarnya' (Whiteford dan Branch, hlm. 4). Dr. Cosme Ordoñez Carceller, dokter asal Kuba yang bekerja di lembaga kesehatan dunia PBB, WHO, dalam wawancaranya dengan Jane Westberg pada 2005, mengatakan, kini di Kuba ada se-

kitar 11 juta penduduk dengan 77.000 dokter, di mana 32.500 di antaranya adalah dokter keluarga. Jika dibandingkan dengan negara industri maju seperti Kanada, misalnya, negeri ini memiliki 35.000 dokter keluarga, dan AS, 52.000 dokter keluarga.²

Pada 2009, ada sekitar 74.880 dokter di Kuba, atau sekitar 1 dokter untuk 150 penduduk (Brouwer, hlm. 56). Rasio jumlah dokter berbanding penduduk ini hanya kalah dari Italia, tapi lebih baik dari rasio jumlah dokter berbanding penduduk di AS (1:480) dan di Inggris (1:450)³ (Whiteford dan Branch, hlm. 4). Dokter keluarga ini menghabiskan waktu di pagi harinya dengan mengunjungi rumah-rumah pendu-

² Jane Westberg, "MAKING A DIFFERENCE An Interview of Cosme Ordo'n ez Carceller," *Education for Health*, Vol. 19, No. 3, November 2006, Taylor&Francis, hlm. 392.

³ Kirk and Erisman, mengutip studi World Health Organization (WHO), mengatakan bahwa rasio dokter berbanding penduduk di Kuba adalah 1:170, sementara di AS adalah 1:188 (hlm. 45).

duk sekitarnya, membuat janji dengan mereka, dan pada sore harinya, mereka datang kembali mengunjungi rumah-rumah keluarga tersebut untuk memeriksa kesehatan dan cara hidup sehat mereka (Kirk and Erisman, hlm. 57). Tidak itu saja, seluruh penduduk Kuba bebas untuk mengakses layanan kesehatan untuk seluruh kategori penyakit tanpa dipungut biaya sepeser pun,

Hasilnya tingkat kematian ibu sangat rendah, yakni 5 per seribu kelahiran pada 2006, dan rata-rata kematian anak di bawah lima tahun adalah 7 per seribu kelahiran (Kirk and Erisman, hlm. 45). Secara komparatif, data tahun 2003 menunjukkan bahwa tingkat kematian dini di Kuba adalah 5,3 per seribu kelahiran, sementara di AS adalah 6,9 per seribu kelahiran. Di Mississippi, salah satu negara bagian AS, tingkat kematian dini lebih tinggi lagi, yakni 11,4 per seribu kelahiran; untuk kalangan penduduk kulit hitam, angka itu lebih tinggi lagi,

14,4. Dari segi tingkat harapan hidup, Kuba juga mengungguli AS, yakni 78 tahun untuk Kuba, sementara di AS sebesar 77,5 tahun.⁴ Kuba adalah satu-satunya negara yang menyediakan perlindungan bagi seluruh penduduknya, khususnya anak-anak terhadap serangan 12 jenis penyakit yang berbeda (Whiteford and Branch, hlm. 9).

Tabel 1
Profil Kesehatan Kuba

Total population	11.258.000
Gross national income per capita (PPP international \$)	not available
Life expectancy at birth m/f (years)	76/80
Probability of dying under five (per 1.000 live births)	120/78

⁴ Cliff Durand, Humanitarianism and Solidarity Cuban-Style A healthcare model for the world, <http://www.zcommunications.org/humanitarianism-and-solidarity-cuban-style-by-cliff-durand>, diunduh pada 2 April 2013.

Probability of dying between 15 and 60 years m/f (per 1.000 population)	120/78
Total expenditure on health per capita (Intl \$, 2010)	431
Total expenditure on health as % of GDP (2010)	10,6

Sumber: Global Health Observatory⁵

Dengan sukses besar yang dicapai oleh sistem kesehatan Kuba, Kofi Anan, ketika menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB pada 2000 mengatakan, Kuba telah membuat iri banyak negara melalui sukses kesehatannya. James D. Wolfensohn, Presiden Bank Dunia pada 2001 juga memberikan pujiannya kepada Kuba, bahwa 'Kuba telah melakukan pekerjaan yang sangat baik pada bidang pendidikan dan kesehatan....Mereka telah melakukan pekerjaan yang

⁵ <http://www.who.int/countries/cub/en/>, diunduh pada 3 April 2013.

baik, dan itu tidak membuatku malu untuk mengakuinya.”⁶

Revolusi dalam Revolusi

Untuk memahami kesuksesan pembangunan sistem kesehatan Kuba, para penulis buku ini sepakat bahwa kita mesti kembali ke masa-masa awal ketika gerakan revolusioner pimpinan Fidel Castro berhasil menggulingkan kediktatoran Fulgencio Batista y Zaldívar yang didukung AS pada 1959. Revolusi bersenjata tersebut menandai sekaligus memisahkan secara tegas dua era sistem kesehatan Kuba: pra-revolusi dan pasca-revolusi.

Pada dasarnya, sistem kesehatan Kuba di masa Batista sudah tersohor sebagai sistem kesehatan terbaik di seluruh negara Amerika Latin saat itu. Ini disebabkan karena sistem pendidikan kesehatan Kuba pra-revolusi mengikuti standar pendidikan kedokteran AS, baik dalam hal

⁶ Kirk and Erisman, *op.cit.*, hlm. 46.

kurikulum pendidikan maupun metode pendidikannya. Karena itu, ketika para dokter lulusan sekolah kedokteran Kuba bermigrasi ke AS, mereka tidak perlu lagi mengikuti ujian persamaan untuk memperoleh izin praktik. Jumlah dokter Kuba, ketika Batista berkuasa, mencapai 6.000 orang. Mayoritas (80 persen) dari para dokter ini bekerja di perkotaan dan menomorsatkan pelayanan terhadap orang kaya. Sementara itu, penduduk yang tinggal di pedesaan terlanter baik dari segi ekonomi maupun kesehatan. Sebagai misal, berdasarkan statistik tahun 1953, jumlah pengangguran di Kuba mencapai sekitar 1.779.236 orang, dan yang bekerja sebanyak 1.972.266 jiwa. Mayoritas dari yang bekerja ini tinggal di wilayah perkotaan: 697.487 bekerja di ibu kota Havana, 519.289 di Santiago, dan hanya 125.895 di Matanzas serta 150.684 di Pinar del Rio (Kirk and Erisman, hlm. 31).

Jadi, sistem kesehatan yang baik saat itu memiliki dua masalah: *pertama*, layanan kesehat-

an yang baik itu hanya dinikmati oleh mereka yang secara ekonomi sanggup membayar; dan *kedua*, dari segi sebaran jumlah dokter, antara yang bekerja di perkotaan dan pedesaan, sangat timpang. Artinya, mayoritas penduduk Kuba sebenarnya hidup dengan kondisi kesehatan yang buruk.

Ketika revolusi menang, pemerintahan baru dengan segera memaklumkan bahwa 'kesehatan merupakan hak asasi manusia yang esensial.' Tidak itu saja, pemerintahan baru ini memutuskan bahwa pendapatan dokter sama dengan pendapatan penduduk Kuba dari profesi lain. Kebijakan ini tentu saja merupakan pukulan telak bagi para dokter yang secara sosial diuntungkan oleh sistem lama, yang selama itu memiliki pendapatan yang jauh di atas profesi lainnya. Kebijakan kesehatan gratis buat semua juga memotong kebiasaan para dokter yang hanya ingin melayani pasien-pasien berkantong tebal.

Dan ini sebenarnya merupakan ciri umum dari para dokter di hampir seluruh dunia.

Karuan saja program pemerintahan baru ini memangkas habis keistimewaan-keistimewaan yang selama itu dinikmati para dokter di bawah pemerintahan diktator Batista. Dan karena keistimewaannya dipangkas, tak heran jika para dokter ini merupakan barisan paling awal yang mengungsi ke AS pascarevolusi. Dari jumlah 6.000 dokter saat itu, sebanyak 3.000 (mayoritasnya adalah para dokter ahli) ikut bekas diktator Batista mengungsi ke AS dan Spanyol. Mayoritas dokter yang tersisa pun keberatan untuk terjun ke desa-desa guna melayani penduduk miskin dan berkulit hitam. Sebagian besar di antara mereka memutuskan untuk tinggal di kota.

Akibat dari eksodus tenaga dokter besar-besaran ini, maka performa kesehatan Kuba dengan seketika merosot drastis, jika tidak bisa dibilang bangkrut. Apakah pemerintahan baru ini menyerah atau berkompromi dengan para

dokter yang ada agar program-programnya bisa berjalan? Tidak. Di sinilah Fidel Castro kemudian mencanangkan program 'Revolusi dalam Revolusi.' Bagi Fidel, merebut kekuasaan itu hal penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk menghancurkan hubungan-hubungan sosial-ekonomi yang eksploitatif yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Che Guevara menambahkan bahwa pemerintahan revolusioner ini haruslah menciptakan 'manusia-manusia baru.' Di sinilah letak perbedaan Castro dan Che dengan kebanyakan aktivis atau politisi yang cukup puas ketika berhasil merebut kekuasaan, tapi tidak mengubah apa pun struktur dan kultur dari kekuasaan lama yang represif dan eksploitatif. Ini pula yang menyebabkan mengapa sinisme terhadap kekuasaan bertumbuh bak cendawan di musim hujan.

Pertanyaannya, dari mana memulai langkah pembangunan sistem kesehatan universal itu?

Menyadari bahwa para dokter Kuba sangat berorientasi pada model kesehatan AS yang individualistis dan *profit oriented*, maka hal pertama yang dilakukan rezim baru ini adalah mengganti seluruh kurikulum pendidikan kesehatan Kuba yang berorientasi AS dengan kurikulum dan metode baru yang dianggap sesuai dengan kenyataan sosial, politik dan ekonomi masyarakat Kuba. Setelah itu, pemerintah mendeklarasikan pendidikan kesehatan gratis bagi semua. Sebelumnya, akibat biaya pendidikan kedokteran yang sangat mahal, dunia kesehatan menjadi semacam lembaga pencetak dinasti dokter dari keluarga kelas menengah atas. Akibatnya, kepedulian para dokter dari lapisan ini pada masyarakat miskin di pedesaan, sangat kecil. Melalui kebijakan baru ini, anak-anak dari keluarga tidak mampu pun bisa merealisasikan mimpinya menjadi seorang dokter.

Tujuan lain dari pendidikan kesehatan gratis ini adalah untuk memenuhi kebutuhan akan

tenaga dokter Kuba yang sangat minim akibat eksodus besar-besaran para dokter sebelumnya. Tanpa jumlah dokter dan tenaga medis yang memadai, maka mustahil untuk memenuhi tujuan 'kesehatan bagi semua' tersebut. Untuk merealisasikan amanat konstitusional ini, pemerintah kemudian membuka kembali University of Havana Medical School pada 1959, yang sebelumnya ditutup oleh Batista pada 1956. Ketika universitas ini dibuka kembali, hanya sekitar 161 profesor medis yang bersedia untuk mengajar.

Seiring dengan penancangan pendidikan gratis bagi semua, pemerintah kemudian mengumumkan kesehatan gratis bagi semua. Seluruh orang Kuba, baik yang mempunyai maupun yang melarat, yang tinggal di rumah-rumah mewah di perkotaan maupun di gubuk-gubuk reyot di pedesaan, warga kulit putih yang bermukim di perkotaan maupun warga kulit hitam (*mula-to*) yang berdiam di pedesaan, semua bebas berobat tanpa dipungut biaya. Program kesehatan

gratis ini kemudian dimasukkan sebagai bagian dari konstitusi, yakni pasal 49 yang berbunyi, 'setiap orang memiliki hak untuk diperhatikan dan dilindungi kesehatannya. Negara menjamin hak ini: melalui penyediaan rumah sakit dan layanan kesehatan gratis... melalui penyediaan pemeriksaan gigi gratis; melalui pembangunan layanan kebersihan; pendidikan kesehatan, uji pemeriksaan kesehatan secara periodik, vaksinasi umum, dan tindakan-tindakan pencegahan medis lainnya.'

Menurut pakar kesehatan masyarakat Ku-ba, Rojas Ochia, pascarevolusi pemerintah Ku-ba menetapkan bahwa tujuan yang hendak dicapai dari pembangunan sistem kesehatan yang baru ini adalah: (1) memberantas korupsi yang sistematis di sektor kesehatan; (2) memberikan prioritas pada pembangunan modal sosial dalam masyarakat; (3) rencana dan implementasi kebijakan serta program-program kesehatan; (4) membangun sistem epidemiologi berdasarkan

himpunan data-data dan analisis; (5) menciptakan sistem kesehatan yang mendemonstrasikan integrasi inter-sektoral maupun multidisipliner; (6) mencari alat-alat untuk mencapai kesetaraan; (7) kerja untuk mencapai dan mengelola kualitas; (8) membangun partisipasi komunitas dalam sistem kesehatan; dan (9) menciptakan sistem kesehatan yang berkelanjutan (Whiteford and Branch, hlm. 9). Agar tujuan-tujuan ini bisa dicapai, maka pemerintah kemudian merumuskan beberapa prinsip yang mendasari pembangunan sistem kesehatan baru ini: (1) kesehatan adalah hak asasi manusia; (2) pengobatan dibentuk baik oleh negara maupun oleh kekuatan-kekuatan sosial; (3) kesehatan adalah tanggung jawab negara dan masyarakat – keterjangkauan dan bebas biaya untuk pelayanan guna mempromosikan kesetaraan bagi seluruh populasi; (4) praktik-praktik pengobatan yang dijalankan didasarkan pada aplikasi secara solid pengetahuan medis yang paling modern; (5) sis-

tem kesehatan harus fokus pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit; (6) partisipasi komunitas kunci bagi pembangunan serta pemeliharaan layanan kesehatan; dan (7) pembangunan kerja sama internasional dalam layanan kesehatan akan ditingkatkan (Whiteford and Branch, hlm. 10).

Tetapi, selain membangun sistem kesehatan yang baru, pemerintahan revolusioner ini sangat meyakini bahwa program ini tidak akan berjalan jika mental para dokter masih seperti mentalnya para dokter rezim Baptista. Sistem kesehatan baru ini hanya akan mungkin berjalan jika ditangani dan dijalankan oleh tenaga-tenaga medis yang bermental baru pula.

Dalam konteks ini, nama Ernesto Che Guevara menjadi abadi, tidak saja karena tindakan-tindakan revolusionernya yang melegenda, tapi juga karena ia meletakkan prinsip-prinsip nilai yang baru bagi para dokter Kuba. Dalam pidatonya pada tahun 1960, Che mengatakan, ha-

sil dari revolusi bukan saja jatuhnya rezim lama (Batista), tapi juga runtuhnya sistem lama (kapitalisme). Dalam sistem baru ini, Kuba punya kesempatan untuk menciptakan manusia-manusia baru yang sesuai dengan nilai-nilai dari sistem baru (sosialisme) tersebut. Dalam konteks pembangunan sistem kesehatan baru, menurut Che, Kuba harus bisa menciptakan dokter-dokter yang revolusioner, yang melihat profesinya bukan sebagai ajang untuk memperkaya diri dan mengejar karier pribadinya, melainkan untuk membebaskan masyarakat Kuba secara keseluruhan. Dalam pandangan Che, 'Individualisme, dalam bentuk tindakan individual sebagai person semata di tengah-tengah masyarakat harus melenyap di Kuba.' 'Di masa depan,' lanjutnya, 'individualisme seharusnya digunakan secara efisien oleh seluruh individu untuk sepenuhnya keuntungan kolektif.'⁷ Secara

⁷ Ernesto Che Guevara, *On Revolutionary Medicine*, August 19, 1960 to the Cuban Militia, <http://www.marxists.org/>

ra konkret ia membedakan antara dokter zaman Batista dengan dokter revolusioner yang ia maksudkan:

‘Beberapa bulan yang lalu, di sini, di Havana, muncul kejadian di mana sekelompok dokter yang baru lulus tidak mau pergi ke wilayah-wilayah pedesaan, dan menuntut pembayaran upah (*remuneration*) sebelum mereka setuju untuk pergi. Dari cara pandang lama, apa yang dilakukan oleh para dokter itu adalah hal yang paling masuk akal karena sesuai dengan dunia di mana ia hidup, jadi aku sangat bisa memahaminya.’

.....

‘....di masa revolusi hari ini, tuntutan yang mereka mesti pelajari, tuntutan yang harus dimengerti dengan baik adalah bahwa yang lebih penting dari

archive/guevara/1960/08/19.htm, diunduh pada 24/5/13.
Untuk mengetahui lebih detil pemikiran Che Guevara, lihat buku Michael Löwy, *The Marxism of Che Guevara Philosophy, Economics, Revolutionary Warfare*, (second edition), Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2007.

sekadar pembayaran upah adalah kebanggaan untuk melayani tetangganya; bahwa yang jauh lebih pasti dan lebih bertahan lama ketimbang emas adalah bagaimana mengakumulasi penghormatan (*gratitude*) dari rakyat. Dan setiap dokter, dalam lingkaran aktivitasnya, harus dan mesti mengakumulasi nilai-nilai langka ini, penghargaan dari rakyatnya.⁸

Dokter Keluarga dan Partisipasi Komunitas

Sebuah kebijakan populis yang *top down*, yang dilengkapi dengan sistem yang baik dan sumber daya manusia yang memadai, dana yang tidak terbatas, tidak menjamin program kesehatan buat semua akan sukses. Apalagi untuk negara kecil dan miskin seperti Kuba, negara jajahan selama ratusan tahun, dan puluhan tahun di bawah pemerintahan kediktatoran. Jika hanya

⁸ *Ibid*

mengandalkan inisiatif dan kebijakan-kebijakan positif dari atas, program ini pasti akan kandas.

Menyadari hambatan-hambatan struktural dan kultural seperti itu, pemerintahan revolusioner ini kemudian menggalakkan program yang disebut kebijakan kesehatan partisipatoris. Dasar pemikirannya adalah kesuksesan sebuah program sangat ditentukan oleh kombinasi antara kebijakan-kebijakan dari atas yang revolusioner dan partisipasi aktif masyarakat dari bawah.

Demikianlah, pada Januari 1960, pemerintah mengeluarkan UU 723 yang melandasi dibentuknya Rural Social Medical Service (RSMS). RSMS ini menawarkan kepada lulusan baru tenaga kesehatan untuk membuat kontrak dengan upah yang menarik, khususnya ketika para lulusan dibutuhkan. Kontrak ini mensyaratkan komitmen minimum selama enam bulan. Menariknya, walaupun pelayanan melalui RSMS ini bersifat sukarela, 318 dari 330 lulusan baru menyatakan bergabung. Pada tahun-tahun berikut-

nya, 386 tenaga medis ikut berpartisipasi, sementara 347 plus 46 dokter gigi terlibat dalam periode ketiga, setelah UU 919 tentang Rural Dental Service disahkan.⁹

Tugas utama dari para dokter ini adalah terjun ke desa-desa terpencil di mana mayoritas penduduk miskin tinggal. Di sana, mereka melakukan pelayanan medik, pengawasan epidemiologi, vaksinasi, inspeksi kesehatan, pendidikan kesehatan, dan prosedur forensik. Seperti direkam Brouwer, pengalaman paling berkesan dari para dokter muda ini ialah bagaimana mereka harus berbaur dengan masyarakat di mana mereka ditugaskan. Tinggal bersama rakyat membuat mereka mengerti penyebab utama penyakit yang diderita rakyat, dan yang lebih penting adalah mereka kemudian menggabungkan pengetahuan-pengetahuan kedokteran modern

⁹ Francisco Rojas Ochoa, MD, *Origins of Primary Health Care in Cuba*, 2003, http://www.medicc.org/publications/medicc_review/1104/pages/cuban_medical_literature.html, diunduh pada 26/5/2013.

yang mereka pelajari di kampus dengan cara hidup rakyat setempat.

Dari pengalaman praktik ini, pemerintah kemudian menggalakkan program dokter keluarga dan kesehatan partisipatoris. Di sini, dokter tidak hanya datang melayani dan mengobati pasien, tapi juga mengorganisir komunitas di mana ia tinggal untuk secara bersama-sama mencegah munculnya penyakit dan menjaga kebersihan lingkungan setempat. Dokter tidak hanya menjadi dokter, tapi lebih dari itu, ia sebenarnya adalah seorang pekerja sosial (*social worker*). Melalui proyek ini, dokter dan masyarakat bekerja bersama-sama menanggulangi penyakit yang ada: dokter setiap saat bisa dihubungi, separuh waktunya dihabiskan di poliklinik dan separuh waktu lainnya ia mengunjungi pasien serta anggota komunitas lainnya. Dengan cara ini, ia bisa memonitor secara langsung dari dekat sejarah penyakit pasiennya dan secepat mungkin memberikan tindakan pencegahan. Pada saat

yang sama, anggota komunitas menjadi pengamat bagi kondisi kesehatan tetangganya dan dengan segera bisa memberitahukan kepada dokter tentang kondisi kesehatan di lingkungannya. Dengan menjadikan pelayanan kesehatan sebagai bagian dari kehidupannya, maka rakyat pun merasa bangga ikut berpartisipasi dalam menyukseskan kebijakan kesehatan buat semua.

Iniilah sebenarnya kunci dari kesuksesan sistem pembangunan kesehatan Kuba hingga saat ini.

Kesehatan di Masa Krisis

Kuba pascarevolusi secara umum bisa dibagi ke dalam dua periode: *pertama*, periode 1959-1989; dan *kedua*, periode pasca 1989 yang ditandai oleh kolapsnya negara-negara Stalinis di Uni Sovyet dan Eropa Timur. Periode pertama boleh dibilang merupakan masa-masa indah pembangunan sistem kesehatan Kuba, di mana hasil dari hubungan dagangnya dengan

pakta ekonomi negara-negara sosialis (COMECON), dan bantuan peralatan medis serta teknis dari Uni Sovyet membuat program 'kesehatan buat semua' berlangsung relatif mulus. Pada periode 1975-1989, misalnya, tingkat pertumbuhan ekonomi Kuba mencapai 4 persen.

Tetapi setelah periode 1989, Kuba memasuki masa-masa paling sulit dalam sejarahnya, yang di Kuba dikenal dengan Periode Khusus/*Special Period*. Periode ini tidak hanya mengancam program 'kesehatan buat semua,' tapi juga revolusi itu sendiri. Impor bahan pangan dan peralatan teknis menurun drastis: Kuba kini menghadapi kelangkaan minyak dan peralatan suku cadang (*spare parts*), serta kehilangan pasarnya untuk gula dan nikel. Setelah menyentuh titik terendah pada 1994, di tahun 2000 impor Kuba tetap 40 persen lebih rendah dari periode sebelum 1989. Di sektor ekspor pada 1990, mereka menyaksikan bagaimana ekspornya jatuh

sebesar 76 persen dalam empat tahun, dan produk domestik brutonya jatuh sebesar 35 persen.

Tabel 2

Indikator Dasar Ekonomi Kuba, 1989 dan 1993
(dalam miliar Pesos, kecuali dinyatakan lain)

	1999	1993	Persentase perubahan
National Product (GSP)	27,2	15,95*	-41,4
Gross Domestic Product (GDP)	19,6	12,8	-34,7
GDP Per Capita (in pesos)	1.865	1,177	-36,9
Soviet/CMEA Aid	6,0	0	-100,0
State Budget Deficit	1,4	4,8	+ 243,0
Foreign Trade Transactions (total exports and imports)	13,5	3,4	-75,0

*Perkiraan sebaran GSP dari 12,5 miliar menjadi 19,4 miliar. Rata-rata kedua tabel ini digunakan di sini.

Sumber: Kirk and Erisman, op.cit., hlm. 98.

Keadaan ini makin diperburuk dengan keputusan Kongres AS yang memberlakukan Torricelli Law, yang secara memalukan disebut Cuba Democracy Act, pada 1992. UU ini melarang

anak-anak perusahaan AS di seluruh dunia untuk melakukan transaksi ekonomi dengan Kuba. Tidak itu saja, UU ini juga melarang perusahaan dan anak perusahaan AS untuk melakukan kerja sama ekonomi dengan perusahaan-perusahaan asing yang melakukan transaksi dagang dengan Kuba. Melalui Torricelli Law ini, Washington berharap kebangkrutan negara sosialis Kuba segera mengalami percepatan.

Secara sosial, dampak dari Periode Khusus sangat dahsyat. Sedikit dari sekian kasus, misalnya, penduduk dewasa Kuba kehilangan berat badan rata-rata sebanyak 20 pounds (1 pound = 0,453592 kg). Tingkat kehilangan berat badan bayi yang baru lahir meningkat dari 7,6 persen pada 1990 menjadi 9 persen pada 1993. Pada 1990, rak-rak farmasi sering terlihat kosong, dan pasien di rumah sakit terpaksa harus membawa makanan dan pakaian mereka dari rumah. Periode 1993 dan 1994, yang merupakan periode paling sulit, sekitar setengah dari peralatan

an medis yang biasa digunakan tidak tersedia di toko obat lokal. Para pengunjung rumah sakit sering melihat bahan-bahan sekali pakai yang seharusnya langsung dibuang, seperti sarung tangan, terpaksa dicuci kembali agar bisa digunakan lagi.

Yang lebih serius kemudian, sangat kurangnya peralatan medis ini menyebabkan para pekerja medis profesional mengalami demoralisasi. Mereka dilanda frustrasi berat ketika harus mendiagnosis penyakit pasien tapi alat untuk itu tidak tersedia. Hal ini menyebabkan banyak dari para dokter ini meninggalkan pekerjaannya dan menjadi sopir taksi, penjual makanan di pinggir jalan, atau bekerja di sektor pariwisata yang pasarnya mulai terbuka. Demoralisasi ini jauh lebih sulit dipulihkan ketimbang kehilangan peralatan material. Misalnya, para dokter yang sebelumnya begitu bangga dengan penghargaan masyarakat atas profesinya, kini mulai mempertanyakan kenapa gaji mereka setara de-

ngan pendapatan pekerja kerajinan tangan yang kurang terdidik?

Dalam Periode Khusus ini, pemerintah kemudian melakukan beberapa penyesuaian kebijakan, misalnya, dengan menggalakkan program '*Doing more with less.*' Pada 1993, pemerintah melegalkan penggunaan '*hard currency*' yang sebelumnya dilarang dan menghasilkan pemasukan sebesar \$1 miliar dari penerimaan yang dikirim oleh keluarga maupun teman yang berada di luar negeri (*remittances*) setiap tahunnya. Investasi asing yang sebelumnya tidak begitu mendapat perhatian, kini diberikan kelonggaran, khususnya di sektor pariwisata. Penduduk Kuba juga didorong untuk membangun usahanya sendiri, di mana 200 ribu orang diperkirakan telah melakukannya.

Walaupun periode itu demikian sulitnya, namun komitmen pemerintah pada 'kesehatan buat semua' tidak berkurang sedikit pun. Pemerintah tetap memberikan prioritas pada pem-

bangunan sektor kesehatan.¹⁰ Selama 1990, misalnya, jumlah dokter yang lulus meningkat empat kali lipat ketimbang periode 1970; jika pada 1985, terdapat sekitar 10 ribu dokter keluarga yang berpraktik di seluruh negeri, maka pada tahun 2000, jumlahnya meningkat tiga kali lipat menjadi 31.000, yang bekerja sama dengan para perawat. Sebagai tambahan, untuk meningkatkan mutu pelayanan dasar di masa sulit ini, pemerintah memperkenalkan konsep baru yang disebut '*good health.*' Melalui konsep ini, rumah sakit-rumah sakit mendorong para ibu muda untuk tetap tinggal di rumah sakit lebih lama dan menikmati manfaat berupa diet yang lebih baik bersamaan dengan promosi

¹⁰ Bandingkan dengan pemerintah Indonesia, yang di masa krisis ekonomi 1997, prioritas pembiayaan justru diberikan kepada penyehatan sektor perbankan, dimana hampir Rp1.000 trilyun digelontorkan ke sektor ini, sementara rakyat banyak menderita akibat kekurangan bahan makanan dan tingginya biaya pendidikan serta kesehatan.

gencar untuk menyusui bayi. Pemerintah kemudian juga menggalakkan produk-produk makanan lokal sebagai alternatif dari kelangkaan makanan impor. Hasilnya, Kuba muncul sebagai negara dengan produk makanan organik terkemuka di dunia. Kota-kota besar, seperti Havana, misalnya, menjelma menjadi kota *organiphonicos*, dan komunitas-komunitas petani organik menjamur di mana-mana. Selain bahan makanannya lebih murah, juga lebih sehat karena kandungan kimiawinya yang sangat sedikit.

Bersamaan dengannya, pemerintah juga mempromosikan beragam model pengobatan dan obat-obatan alternatif, seperti pengobatan tradisional dan penggunaan bahan-bahan dari tetumbuhan sebagai bahan dasar obat-obatan. Sebagai tindak lanjutnya, pada pertengahan 1990, kementerian Kesehatan Publik mendistribusikan buku manual yang berisi kompilasi hasil penelitian para ilmuwan mengenai *medicina verde* atau 'obat-obatan hijau' yang berba-

han dasar tumbuh-tumbuhan. Sebagian besar rumah sakit dan klinik terkemuka lantas memancang daftar rekomendasi penggunaan herbal dan syarat-syarat penggunaannya, yang bisa digunakan untuk pengobatan radang perut hingga nyeri otot.

Pada tahun 2000, Kuba boleh dibilang sudah berhasil pulih dari periode krisis. Hanya dalam waktu satu dekade, sistem kesehatan Kuba menjadi semakin kuat, murah, dan berbasis bahan dasar lokal dan tetumbuhan.

Pertama Adalah Tuhan, Kemudian Dokter-Dokter Kuba

Jika mayoritas negara di dunia berlomba-lomba untuk mengekspor komoditi, baik bahan mentah maupun barang jadi; berbasis pertanian, industri, atau pun jasa, maka Kuba terkenal sebagai negara pengeksport tenaga dokter terbesar di dunia. Dengan bangganya, Fidel

Castro mengklaim bahwa Kuba adalah negara *super power* dalam bidang kesehatan.

Henry Reeve Emergency Brigade,¹¹ demikian nama organisasi para dokter yang melintas benua itu. Tetapi, jika ekspor komoditi bertujuan meningkatkan pendapatan keuangan negara, maka ekspor tenaga dokter Kuba tujuannya adalah murni kemanusiaan dan solidaritas bagi para korban bencana. *"Solidarity with their brothers"* adalah semboyan utama para dokter Kuba ketika melangkah ke kakinya ke berbagai penjuru dunia yang membutuhkannya. Karena itu, Kuba tidak mensyaratkan negara yang membutuhkan bantuan tenaga medis untuk menyiapkan sejumlah uang tertentu. Bahkan, para dokter yang dikirim ke luar negeri, ke negara-negara yang mengalami bencana, dibayar oleh pemerintah Kuba sendiri.

¹¹ Diambil dari nama seorang sukarelawan asal AS yang berperang untuk kemerdekaan Kuba dari kolonialisme Spanyol.

Bukan berarti pengiriman tenaga dokter ini tanpa syarat. Brower (hlm. 27) mencatat, ada tiga syarat utama yang harus disepakati oleh Kuba dan negara-negara penerima bantuan medis ini:

Pertama, negara-negara tujuan harus mau bekerja sama dengan tenaga medis Kuba, termasuk para dokternya dalam pengobatan umum secara menyeluruh (*medicina general integral*). Para dokter, suster, dan para profesional lainnya ini hanya akan bermukim selama dua tahun dan kemudian diganti dengan sukarelawan lainnya;

Kedua, personel-personel pelayanan kesehatan Kuba tidak hanya menyediakan pelayanan kesehatan dasar pada penduduk lokal, tetapi juga menginisiasi pembangunan sumber daya lokal yang nantinya sanggup mempromosikan pelayanan kesehatan di masa depan. Ini termasuk pelatihan asisten medis di tempat kejadian, dan pendidikan-pendidikan di akar rumput dalam pencegahan medis, serta menerima anak-anak muda di sekolah medis ELAM) (La Escuela

Latinoamericana de Medicina/the Latin American School of Medicine) yang berlokasi di luar kota Havana, secara gratis;

Ketiga, tim medis Kuba diizinkan untuk melakukan kolaborasi dengan praktik-praktik kesehatan dari para dokter lokal; biasanya ini berlaku bagi tim yang berlokasi di daerah pedesaan di mana tidak ada pelayanan kesehatan yang tersedia.

Berdasarkan kerja sama ini, melalui proyek Plan Integral de Salud, para dokter Kuba yang tergabung dalam Henry Reeve Emergency Brigade telah melayani rakyat di 36 negara yang membentang dari Afrika, Asia, Oseania, Amerika Latin, dan Karibia. Pada akhir 2008, tercatat ada sekitar 3.462 kerja sama medis, 2.393 di antara mereka adalah para dokter yang bekerja dalam misi ini. Jika ditotal sejak proyek ini dimulai pada 1961, maka ada lebih dari 124.000 pekerja medis profesional yang bekerja di lebih dari

154 negara.¹² Pada periode 1998-2008, diperkirakan ada sekitar 67.000 tenaga profesional kesehatan yang bekerja di Plan Integral de Salud, dan lebih dari 6.000 di antaranya bekerja di Haiti (Brouwer, hlm. 28).

Yang paling menarik, para dokter dan profesional medis Kuba ini umumnya bekerja di wilayah-wilayah pedesaan, kampung-kampung kumuh di wilayah perkotaan, atau tempat-tempat yang tidak terjangkau pelayanan medis. Sasaran ini sengaja dipilih, karena memang di negara-negara yang mengalami bencana tersebut, mayoritas para dokternya bermukim di wilayah perkotaan, yang perhatian utamanya adalah melayani orang kaya dan mengejar karier pribadi. Sebagai misal, pada saat badai Hurricane George menghantam Haiti pada 1998, ketika brigade medis Kuba ada di tempat tersebut,

¹² Lihat Don Fitz, Cuba: *The New Global Medicine*, *Monthly Review*, 2012, Volume 64, Issue 04 (September). Bisa dibaca di <http://monthlyreview.org/2012/09/01/cuba-the-new-global-medicine>, diunduh pada 29/5/13.

diketahui bahwa 90 persen dokter Haiti tinggal dan berpraktik di perkotaan, walaupun lebih dari 2/3 penduduk Haiti tinggal di pedesaan.

Selain itu, dengan pengalaman menangani korban bencana selama berdekade-dekade, brigade kesehatan Kuba terkenal sangat profesional dibanding para sukarelawan dari negara-negara lain. Ketika Haiti diguncang gempa bumi dahsyat pada 12 Januari 2010, pemerintah Kuba dengan segera men-*deploy* 344 tenaga medis profesional untuk beroperasi di Haiti. Keadaan Haiti, khususnya ibu kota Port Au Prince, lumpuh total: transportasi macet dan sebagian besar jaringan listrik padam. Dalam kondisi seperti itu, dengan segera para dokter dan profesional medis Kuba mengambil alih pengoperasian rumah sakit La Paz, yang beruntung tidak hancur akibat gempa tersebut. Dalam tiga hari pertama setelah gempa, para dokter Kuba ini sanggup melakukan pelayanan medis yang lebih besar ketimbang sukarelawan medis dari negara ma-

na pun. Dalam hal personel medis, Kuba mengirimkan sekitar 1.500 tenaga medis, sementara AS hanya mengirimkan sebanyak 550 personel pada saat yang sama. Jika personel medis AS sanggup menangani pasien sebanyak 871 pasien, maka tenaga medis Kuba telah menangani pasien sebanyak 227.143 orang.¹³ Dengan kapasitasnya yang luar biasa itu, maka ketika para dokter dan perawat dari Spanyol, Chile, Republik Dominica, dan Kanada, tiba di Haiti, mereka mendapati kenyataan bahwa satu-satunya jalan untuk bisa efektif di lapangan adalah dengan berintegrasi dalam tim yang dipimpin oleh para dokter Kuba.

Peran penting Kuba dalam hal bantuan kemanusiaan buat para korban gempa dahsyat Haiti itu, diakui sendiri oleh Presiden Haiti, René Preval. Pada 27 Maret 2010, dalam pertemu-

¹³ Lihat Don Fitz, *The Latin of American Medicine Today*, 2011, Volume 62, Issue 10 (Maret), <http://monthlyreview.org/2011/03/01/the-latin-american-school-of-medicine-today>. Diunduh pada 1/6/13.

an bersama antara Haiti, Kuba dan Brazil untuk membangun kerja sama yang lebih erat dalam bidang kesehatan, Preval mengatakan bahwa misi kesehatan Kuba telah mendatangkan derajat kepercayaan yang sangat tinggi dari rakyat Haiti. Selanjutnya ia mengatakan,

‘Bagi rakyat Haiti, pertama-tama adalah Tuhan dan kemudian adalah para dokter Kuba. Dan bukan hanya saya saja yang mengatakan ini, sesuatu yang saya sangat yakini kebenarannya, tapi juga rakyat miskin di komunitas-komunitas, mereka yang sangat miskin’ (Brouwer, hlm.38).

Tetapi, seperti yang tercantum dalam tiga butir perjanjian kerja sama di atas, misi kesehatan Kuba ini tidak hanya bersifat karitatif. Datang saat bencana dan pergi setelahnya tanpa bekas. Karena para dokter ini biasanya selalu bekerja di wilayah-wilayah pedesaan yang minim tenaga medisnya, maka para dokter Kuba ini juga selalu melakukan pendidikan tenaga medis terhadap penduduk lokal yang nantinya akan ber-

tugas secara tetap melayani penduduk miskin ketika misi kesehatan Kuba ini berakhir masa tugasnya. Fungsi ini dijalankan di hampir seluruh negara di mana mereka pernah bertugas.

Tetapi pelatihan penduduk lokal sebagai asisten medis, walaupun sangat membantu namun dianggap kurang mencukupi. Karena para dokter di negara berkembang lebih suka meninggalkan kota kecil dan pergi ke kota besar (*brain drain*), maka pemerintah Kuba lalu mendesain satu program yang disebut dengan *brain gain*. Melalui program ini, kalangan muda dari negara berkembang dididik menjadi tenaga medis profesional secara gratis, namun dengan perjanjian, begitu mereka lulus, mereka harus melayani komunitas rakyat miskin di negaranya masing-masing.

Sebagai realisasinya, pada tahun 1998, atas usul Jenderal Raul Castro, pemerintah kemudian mengubah gedung akademi Angkatan Laut menjadi kampus sekolah medis ELAM (La Es-

cuela Latinoamericana de Medicina/the Latin American School of Medicine). ELAM dibangun untuk memberikan pendidikan kedokteran gratis bagi mahasiswa dari negara-negara yang membagi kesadaran bersama tentang 'kesehatan buat semua.' Pada tahun 1999, pertama kalinya ELAM menerima mahasiswa dari 24 negara: 19 negara dari Amerika Latin, empat dari Afrika, dan AS. Dengan lama pendidikan selama enam tahun, pada 2005, ELAM untuk pertama kalinya merayakan kelulusan dokter angkatan pertama. Pada 2007, mahasiswa ELAM datang dari 27 negara. Pada 2008, jumlah negara yang mahasiswanya belajar di ELAM bertambah menjadi 40 negara. Pada April 2010, jumlah mahasiswa ELAM mencapai 21.018 orang, di mana mereka datang dari 100 negara. Hampir seluruh negara Amerika Latin mengirimkan mahasiswanya ke ELAM. Bahkan Columbia, negara yang dipimpin oleh kekuatan sayap kanan, mengirimkan 385 orang. Dari Afrika, tercatat ada 36

negara yang mengirimkan mahasiswanya, demikian pula dari Timur Tengah, Asia, Kepulauan Pasifik, dan Karibia.¹⁴

Secara filosofis, nilai-nilai yang diterapkan di ELAM ini mengikuti apa yang telah dicanangkan oleh Che Guevara pada awal-awal revolusi. Sebagaimana dikemukakan Dr. Patrick Dely, alumnus ELAM asal Haiti, kepada wartawan Conner Gory, ketika ia pertama kali menginjakkan kakinya di Kuba:

‘Seperti umumnya anak muda, saya pergi ke sana dengan gagasan dan filsafat saya sendiri. Tujuan saya dan perspektif hidup saya ada di Haiti. Saya

¹⁴ Fitz, *ibid.* Para mahasiswa yang belajar di ELAM bukan saja datang dari negara yang berbeda, tapi juga ras dan agama yang beragam. Kuba sebagai negara sosialis, yang dalam konstitusinya mengatakan bahwa negara terpisah dari agama, dalam praktiknya sangat memperhatikan keragaman para mahasiswa ini. Misalnya, untuk mahasiswa Muslim, disediakan sarana ibadah solat serta kafetaria yang menyediakan makanan-makanan khusus yang tidak mengandung babi (babi sendiri adalah makanan favorit rakyat Kuba). Informasi lebih detail mengenai hal ini, lihat Brouwer (2011).

pergi ke Kuba untuk menjadi seorang dokter, kemudian kembali ke Haiti untuk melayani rakyat saya, tentu saja, tapi juga untuk mencapai sebuah level baru dan gaya hidup tertentu, yang melampaui apa yang bisa saya dapatkan sebelumnya. Tapi ketika saya tinggal di Kuba, bahkan tidak lebih dari dua tahun, pikiran saya mulai berubah, dan kemudian juga tujuan-tujuan hidup saya. Sebuah filsafat baru pelan-pelan membentuk cara berpikirku. Saya mulai memimpikan sesuatu yang besar, melampaui dari sekadar menjadi seorang dokter. Saya mulai berpikir tentang negara saya, dan mulai berpikir tentang yang lain. Saya mulai merasakan tanggung jawab untuk melayani rakyat sebanyak mungkin yang saya bisa' (Brouwer, hlm. 37),

Pembiayaan Sistem Kesehatan

Lantas, bagaimana membiayai sistem 'kesehatan buat semua' itu? Ini pertanyaan yang selalu menarik diajukan oleh para ekonom. Dari mana uang untuk pembiayaan itu? Berapa be-

sar anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor kesehatan? Bisakah sistem kesehatan gratis ini bertahan lama?

Berdasarkan data World Macroeconomic Research, pendapatan nasional kotor Kuba pada 2010 sebesar US\$63 billion.¹⁵ Dari angka sebesar itu, menurut Bank Dunia (2010), pemerintah mengalokasikan sebesar 14,5 persen untuk sektor kesehatan.¹⁶ Di Kuba sendiri, peranan swasta (bisnis kesehatan) dalam pengelolaan kesehatan sangat minim, yakni hanya sebesar 0,5 persen pada 2010, sementara peranan pemerintah mencapai 95,3 persen.

Data yang berbeda dikemukakan oleh Kirk and Erisman (hlm. 45), yang mengatakan bahwa pada 2009 saja, Kuba telah mengalokasikan 23

¹⁵ Lihat, http://kushnirs.org/macroeconomics/gni/gni_cuba.html, diunduh pada 2/6/13.

¹⁶ Lihat, <http://www.tradingeconomics.com/cuba/health-expenditure-total-percent-of-gdp-wb-data.html>, diunduh pada 2/6/13.

persen dari belanja negara untuk sektor kesehatan dan 10 persen untuk sektor pendidikan. Dengan anggaran sebesar itu, Kuba membelanjakan sekitar US\$251 per orang untuk pelayanan kesehatan, dibandingkan dengan AS yang membelanjakan US\$5.711 per orang per tahun. Namun, dengan anggaran sebesar itu, 99 persen penduduk Kuba memiliki akses kepada pelayanan kesehatan yang sangat profesional.

Yang juga menarik, pendapatan Kuba yang terbesar adalah dari sektor jasa, di mana sektor kesehatan memberikan sumbangan yang cukup signifikan. Pada masa 'Periode Khusus,' misalnya, pemerintah terpaksa mengizinkan terjadinya apa yang disebut '*medical tourism*.' Walaupun tidak ada data yang pasti, tapi menurut prediksi Kirk and Erisman (hlm. 48), setiap tahunnya diperkirakan ada sekitar 2-3 ribu orang wisatawan berobat ke Kuba. Sebuah artikel tanpa tanggal bahkan menyebutkan bahwa pada 1996 saja, 'lebih dari 7.000 "wisatawan medis"

membayar sebesar US\$25 million untuk pelayanan kesehatan.’ Laporan wartawan BBC, Tom Fawthrop, pada 2003, memperkirakan bahwa pada 2002 saja, ada ‘lebih dari 5.000 pasien asing yang berobat ke Kuba, untuk memperoleh pelayanan kesehatan seperti operasi mata, kelainan neurologis, seperti *multiple sclerosis* dan penyakit Parkinson serta ortopedis. Fawthrop mengklaim bahwa sektor kesehatan ini telah memberikan pemasukan sekitar US\$40 juta per tahun.

Ekspor sektor kesehatan Kuba juga tak kalah mengagumkan. Brouwer (69-72) menulis bahwa produk bioteknologi Kuba, yang mencakup 1.200 paten, menyumbang pemasukan sebesar US\$340 million pada 2008, meningkat sebesar 20 persen dari tahun sebelumnya. Perkembangan pesat teknologi biotek ini telah mengundang pemerintah Brazil untuk menginvestasikan uangnya di sektor ini, melalui kepemilikan bersama. Pusat-pusat penelitian baru yang disebut

sebagai '*scientific poles*' kini telah dibangun di 12 provinsi, untuk memfasilitasi model-model baru kerja sama para ilmuwan, profesor, dan para inovator bisnis.

Prestasi industri biotek Kuba ini mengagumkan, karena hingga saat ini Kuba masih tetap diblokade secara ekonomi oleh AS. Akibatnya, pemerintah sulit untuk memperoleh peralatan-peralatan kedokteran yang paling baru dan canggih, untuk menopang percepatan pembangunan sektor ini.

Penutup

Tiga buku yang di-review di sini, dengan sangat lengkap menampilkan profil dari sistem kesehatan Kuba. Dalam pembahasannya, ketiga buku ini menyimpulkan bahwa sukses pembangunan sistem kesehatan Kuba tergantung pada filosofi pembangunan berbasis manusia yang dianut pemerintah Kuba, sistem kesehatan yang menggabungkan antara profesionalisme tenaga

medis dan partisipasi aktif dari masyarakat, serta kesediaan pemerintah untuk selalu melakukan perubahan dan adaptasi terhadap persoalan-persoalan baru yang dihadapi.

Sistem kesehatan Kuba ini juga terbukti mampu eksis dalam era di mana sistem kapitalisme-neoliberal begitu hegemonik dalam empat dekade terakhir. Ketika sistem kesehatan secara global dan di masing-masing negara lain semakin timpang, Kuba justru sukses mempertahankan kebijakan 'kesehatan buat semua.' Seperti ditulis Whiteford and Branch, keberhasilan sistem kesehatan Kuba adalah karena mereka mampu mengombinasikan antara 'kebebasan individual' vs 'intervensi negara.'

Namun demikian, para penulis juga mewanti-wanti bahwa sistem kesehatan Kuba ini tak bisa diadopsi secara mentah-mentah oleh negara lain. Apa yang bisa kita pelajari dari sistem kesehatan Kuba ini adalah prinsip dasarnya bahwa 'pembangunan nasional itu harus

berbasis dan berorientasi pada manusia.’ Ku-
ba melalui jalan sosialisme, memberikan con-
toh dan inspirasi kepada dunia bahwa prinsip
dasar itu bisa direalisasikan dan bertahan lama
dalam sistem yang menjadikan ‘kapital sebagai
nabi-nabinya.’ ***

Artikel ini sebelumnya merupakan review atas ti-
ga buku masing-masing dari Steve Brouwer, 2011. *Revolutionary Doctors How Venezuela and Cuba are Changing the World's Conception of Health Care*, Monthly Review Press, NY; John M. Kirk and H. Michael Erisman, 2009. *Cuban Medical Internationalism Origins, Evolution, and Goals*, Palgrave Macmillan, NY; dan Lionda M. Whiteford and Laurence G. Branch, 2009. *Primary Health Care in Cuba The Other Revolution*, Rowman & Littlefield Publishers, Inc, yang terbit di Left Book Review LBR) edisi XI/2013, <https://indoprogress.com/2013/06/kesehatan-buat-semua/>

Bab III

Sosialisme Dari Bawah

— Pengalaman di Kerala (India) —

PARA penggemar sastra dan aktivis gerakan sosial, tentu mengenal nama Arundathi Roy. Ya, melalui karyanya *The God of Small Things*, Roy telah melesat menjadi salah satu sastrawan yang diakui dunia internasional. Sebagai sastrawan ia menambah panjang daftar sastrawan India yang menjulang secara internasional, setelah Salman Rusdhi. Sebagai aktivis gerakan sosial, Roy menambah deretan aktivis perempuan terkenal India, setelah Vandhana Shiva. Di Amerika Serikat, pengunjung kuliah umum Roy mencapai

angka tiga digit, sejajar dengan pengunjung kuliah umum intelektual terkemuka Noam Chomsky.

Namun tak banyak yang tahu bahwa Roy beribukan seorang aktivis sosial asal Kerala, sebuah negara bagian di Selatan India. Negara bagian di mana Roy dibesarkan itu, memiliki luas sekitar 1,2 persen dari keseluruhan luas India, dan dengan jumlah penduduk sebanyak 3,2 persen dari populasi India. Kerala adalah sebuah negara bagian yang secara politik dikuasai oleh Partai Komunis India-Marxis (CPI/M). Dan *The God of Small Things*, dalam banyak hal, menggambarkan iklim politik, lebih khusus lagi sentimen Marxis, di Kerala. Namun, tulisan ini tidak akan membicarakan Roy dan karyanya, melainkan Kerala, khususnya mengenai penerapan Sosialisme Dari Bawah.

Mengapa Kerala penting dibicarakan? Seperti negara bagian India lainnya, Kerala termasuk jajaran negara miskin. Tapi menariknya, Ke-

rala direkomendasikan oleh banyak sarjana ahli pembangunan sebagai salah satu model pembangunan negara miskin di Dunia Ketiga, yang dikenal dengan sebutan “*Kerala model of development.*” Amartya Sen, penerima hadiah Nobel ekonomi asal India mengatakan, peluang hidup laki-laki dan perempuan di Kerala lebih baik ketimbang orang kulit hitam di Amerika Serikat. Masih menurut Sen, tingkat buta huruf di Kerala jauh lebih rendah ketimbang seluruh provinsi di Cina. Sementara menurut Richard W. Franke and Barbara H. Chasin, Model Kerala itu dicirikan oleh:

1. Seperangkat indikator kualitas hidup material yang tinggi bertepatan dengan pendapatan per kapita yang rendah, keduanya didistribusikan di hampir seluruh penduduk Kerala;
2. Serangkaian program redistribusi kekayaan dan sumber daya yang sebagian be-

sar telah menghasilkan indikator kualitas hidup material yang tinggi;

3. Tingkat partisipasi politik dan aktivisme yang tinggi di kalangan orang-orang kebanyakan bersama dengan sejumlah besar pemimpin yang berdedikasi di semua tingkatan. Aktivisme massa Kerala dan kader yang berkomitmen mampu berfungsi dalam struktur yang sebagian besar demokratis yang telah diperkuat oleh aktivisme mereka.¹

Pujian juga diberikan Joseph Tharamangalam, salah seorang kritikus berat dari apa yang

¹ Richard W. Franke and Barbara H. Chasin, "Is the Kerala Model Sustainable? Lessons from the Past: Prospects for the Future", In Govindan Parayil (ed.), *The Kerala Model of Development: Perspectives on Development and Sustainability*, (London: Zed Books, 1999). <https://msuweb.montclair.edu/~franker/KeralaPapers/ParayilBookdeconf.pdf>. Lihat juga Sam Kristen, "The Kerala Model Analysis of the developmental model in the Kerala state in India, its success, and its duplicability", https://www.academia.edu/9816807/The_Kerala_Model

disebut “Model Kerala”. Menurutny, jika kita menggunakan definisi kualitas hidup dan kebahagiaan (*well-being and quality-of-life*), maka kehidupan rakyat Kerala mungkin lebih baik ketimbang kehidupan rakyat di sebagian tempat di Amerika Serikat. Dan inilah kesimpulannya, “tidaklah mengejutkan jika Kerala telah ditetapkan sebagai sebuah model pembangunan bagi negara-negara miskin”².

Coba kita lihat postur data berikut, yang didasarkan pada indikator kualitas hidup pada tahun 1993.

² Joseph Tharamangalam, *The Perils of Social Development without Economic Growth: The Development Debacle of Kerala, India*, <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14672715.1998.10411031>

Indikator	Kerala	India	Negara Berpendapatan Rendah	Amerika Serikat
Perkapita GNP (\$)	180	300	300	24.740
Tingkat Buta Huruf (%)	91	48	51	96
Tingkat Harapan Hidup (Tahun)	73 (laki-laki) 74 (Perempuan)	61	56	76
Tingkat Kematian Bayi (Per 1000)	13	80	89	9
Tingkat Kelahiran (Per 1000)	17	29	40	16

Sumber data pada tabel: Frankie and Chasin, "Kerala Model Sustainable" in M.A. Oommen (ed.), *Rethinking Development: Kerala's Development Experience* Vol. I, 1999.

Secara kultural, Kerala juga merupakan satu-satunya negara bagian di India, di mana kerukunan beragama terjalin secara alamiah dengan tingkat toleransi yang tinggi. Sesuatu yang bagi India keseluruhan masih membutuhkan perjuangan panjang, berdarah, dan melelahkan. Di tanah tempat Arundhati Roy dibesarkan itu, terdapat tiga kelompok besar agama, yakni Hindu (60 persen) dan Islam dan Kristen berbagi sama masing-masing 20 persen. Di Kochi, sebuah kota kecil, bisa ditemukan segelintir peng-

anut agama Yahudi. Dan dalam sebuah negara di mana masyarakatnya terbagi-bagi dalam sistem kasta, Kerala adalah juga satu-satunya negara bagian di mana kasta terendah bisa memperoleh akses yang sama terhadap fasilitas publik yang disediakan pemerintah. Kembali mengutip Sen,

“sebuah negara atau wilayah seharusnya tidak hanya memiliki masyarakat majemuk tetapi juga harus menghargai alam yang majemuk itu, dan saya percaya pengalaman pendidikan Kerala telah sangat diuntungkan dari pluralitas budayanya”.

Model Kerala

Berdasarkan studi yang dilakukan Anand Matthew, ada beberapa gambaran kunci mengenai apa yang disebut “*the Kerala Model*”: (1) *land reforms*; (2) upah dan pengaturan kerja; (3) pelayanan kesehatan; (4) pendidikan; (5) distribusi makanan untuk publik; (6) peran partai ki-

ri; dan (7) kompetisi politik melalui proses politik multi partai.

Saya akan memberikan penjabaran secara ringkas mengenai lima poin pertama yang disebutkan Matthew ini. Menyangkut peran partai kiri dan kompetisi politik melalui proses pemilu akan saya paparkan lebih detail di bagian akhir artikel ini.

Land Reforms

Di masa lalu, Kerala adalah sebuah negara feodal. Kepemilikan lahan merupakan basis bagi posisi ekonomi, status politik dan kekuasaan politik. Semakin besar luas kepemilikan lahan seseorang atau kelompok, semakin tinggi posisi ekonomi dan kekuasaan politiknya.

Masuknya kolonialisme Inggris yang kemudian memperkenalkan usaha ekonomi baru, pendidikan dan perusahaan perkebunan, sedikit banyak telah menggoyahkan tatanan tradisional yang feodal itu. Loyalitas masyarakat terhadap

para tuan tanah pun mulai mencair, sehingga usaha-usaha untuk mengubah komposisi kepemilikan lahan ini pun mulai timbul. Salah satunya adalah pemberontakan yang gagal pada 1921 di Malabar, yang digelar oleh petani muslim yang disebut Mappila.

Setelah kemerdekaan India pada 1947, tuntutan untuk *land reforms* makin gencar. Kali ini, keterlibatan Partai Komunis India mulai menonjol. Dengan mengorganisir masyarakat akar rumput pedesaan, mereka melancarkan agitasi dan propaganda agar petani penyewa tidak membayar uang sewa kepada tuan tanah. Sebaliknya mereka harus menduduki dan mengambil alih tanah milik sang tuan tersebut. Gerakan menuntut *land reforms*, atau lebih tepatnya perjuangan melawan modus produksi (*mode of production*) feodal ini, telah melibatkan partisipasi massa yang luas dan merupakan gerakan yang sanggup menyatukan seluruh kepentingan masyarakat akar rumput.

Sedikit demi sedikit tuntutan *land reforms* mulai menuai sukses. Puncaknya, ketika Partai Komunis India memenangkan pemilu Kerala pada 1957. Di masa pemerintahan baru ini, *The Kerala Agrarian Relations Bill*, *the Industrial Relations Bill* dan *the Education Relation Bill*, diadopsi oleh pemerintah Kerala. Khusus mengenai *the Kerala Agrarian Relations Bill*, perlawanan datang dari kalangan tuan tanah. Namun demikian, arus kemenangan telah berpihak pada petani miskin. Pada tahun 1974, pemerintah mengodifikasi hak-hak buruh pertanian dalam *the Kerala Agricultural Workers Act*. Melalui undang-undang baru ini, upah buruh tani meningkat tajam. Selain itu, asuransi pengangguran dan pensiun bagi pekerja diperkenalkan pada 1980 dan mulai berlaku efektif pada 1982. Pada tahun 1986, mulai diberlakukan pensiun bagi para janda dan mereka yang secara fisik lemah. Pada tahun itu, diperkirakan pe-

merintah mengeluarkan 0,25 persen dari pendapatannya untuk membayar uang pensiun ini.

Demikianlah, semenjak pertengahan 1980-an, modus produksi feodal berhasil dihapus.

Upah dan Pengaturan Kerja

Sampai dengan tahun 1960an, Kerala masih tetap merupakan negara agraris yang miskin. Hanya sedikit pabrik yang bisa ditemukan di sana. Pabrik-pabrik baru mulai bermunculan ketika pemerintah berinisiatif membangun perusahaan negara. Namun demikian, sejalan dengan itu, pemerintah mulai memperkenalkan sejumlah aturan untuk meningkatkan upah dan kondisi-kondisi kerja buruh. Sebagai contoh, ketika pemerintah menerjunkan tim investigasi ke perkebunan kacang mete (*cashew*) dan serabut kelapa (*coir*), ditemukan situasi di mana buruh, terutama buruh perempuan, menerima upah yang sangat rendah dan bekerja di bawah kondisi-kondisi yang sangat buruk.

Nah berdasarkan aturan baru ini, pihak pabrik diharuskan untuk meningkatkan upah buruh, bantuan kesehatan dan asuransi kerja. Tidak itu saja, jam kerja pun diwajibkan hanya selama 9 jam per hari dan manajemen pabrik diharuskan untuk melindungi kepentingan buruh perempuan. Batas usia kerja ditetapkan adalah 14 tahun, serta hak dan kewajiban manajemen dan buruh ditetapkan dengan jelas melalui kerja sama antara keduanya.

Melalui *the Kerala Maternity Benefits Act* yang ditetapkan pada 1957, sejumlah keuntungan besar berhasil direngkuh oleh buruh perempuan. Sementara itu, pemerintah juga memperlakukan *the Workmen's Compensation Act* untuk mengover kecelakaan-kecelakaan yang dialami di tempat kerja. Fasilitas seperti kantin, ruang baca, toko koperasi dan subsidi pelayanan kesehatan sudah harus disediakan sejak pabrik mulai didirikan.

Pelayanan Kesehatan

Program pelayanan kesehatan, merupakan salah satu proyek terbesar dan tersukses di Kerala. Kebijakan pelayanan kesehatan publik telah dilaksanakan secara luas semenjak tahun 1970, di mana desa Nadur merupakan tempat pertama diujicobakannya pelayanan kesehatan publik ini. Pada 1996-2001, People's Planning Campaign di Kerala juga mencakup desentralisasi pelayanan kesehatan yang mencakup penyediaan perumahan bagi keluarga miskin, meningkatkan keberadaan fasilitas sanitasi, air minum yang bersih dan terjangkau, dan perluasan seluruh fasilitas-fasilitas kesehatan ke seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Perusakan terhadap fasilitas-fasilitas ini diancam hukuman yang seberat-beratnya.

Pendidikan

Pada sektor ini, pemerintah Kerala patut mendapatkan acungan jempol. Pendidikan di

Kerala sedari awal didesain melintasi garis gender dan kasta, dua soal yang begitu rumit dalam konfigurasi masyarakat India.

Penyediaan sarana pendidikan yang gratis dan meluas ini memang murni atas sponsor dan arahan dari negara. Namun demikian, setelah *land reforms* dan menguatnya kesadaran politik massa akibat proses radikalisisasi dalam masa-masa perjuangan mengenyahkan moda produksi feodal itu, pendidikan juga merupakan inisiatif organisasi-organisasi komunal. Massa yang ter-radikalisisasi ini pada akhirnya memegang peran penting dalam kesuksesan pembangunan pendidikan di Kerala. Inilah yang dicatat oleh Franke dan Chasin dalam studi monumental mereka, *Kerala: Radical Reform as Development in an Indian State*,

“Hak untuk bebas dari buta huruf (*the right to literacy*) di Kerala telah bertransformasi dari murni

kebijakan yang disponsori oleh pemerintah menjadi sebuah gerakan massa rakyat”.³

Keberhasilan sistem pendidikan di Kerala, juga mendapat pujian khusus dari Amartya Sen. Tak banyak yang tahu, bahwa pentingnya pendidikan sebagai syarat untuk kuatnya demokrasi dan pembebasan manusia yang merupakan inti dari tesis Sen, sebenarnya banyak terinspirasi dari sukses pendidikan di Kerala. Dalam sebuah kuliah umumnya di London School of Economics (LSE), Sen bercerita bagaimana sejak tahun 1963 ia sudah meyakini bahwa kebijakan pemerintah Kerala mengenai pendidikan dan kesehatan universal merupakan sesuatu yang patut dicontoh oleh pemerintah India.⁴ Inilah sebagi-

³ Richard W. Franke and Barbara H. Chasin, *Kerala: Radical Reform as Development in an Indian State*, (Food First Book, 1994).

⁴ Sonali Campion, “Amartya Sen: India can’t become a global economic power with an uneducated, unhealthy workforce”, <https://qz.com/india/557199/amartya-sen-india-cant-become->

an dari apresiasinya terhadap sistem pendidikan di Kerala, yang disampaikan dalam kuliah umum di universitas Kerala, pada Desember 2001,

Salah satu perbedaan yang menarik antara West Bengal dan Kerala adalah pengabaian perspektif pendidikan dalam pemikiran sayap kiri tradisional di negara bagian West Bengal. Kehadiran elemen agresif telah menentukan agenda politik radikal di Kerala dalam arah pro-pendidikan, sesuatu yang tidak terjadi di West Bengal, atau di negara-negara bagian lainnya.

Distribusi Pangan

Alasan mendasar di balik kebijakan ini adalah begitu banyaknya penduduk miskin di pedesaan Kerala yang menderita kelaparan akibat akses yang terbatas pada sumber daya makan-

a-global-economic-power-with-an-uneducated-unhealthy-workforce/

an. Penderitaan itu semakin membuncah ketika terjadi krisis pangan pada awal tahun 1940an. Untuk mengawal kebijakan ini, pemerintah kemudian membentuk *Kerala's public distribution system* (KPDS), dengan tujuan utama meningkatkan kecukupan nutrisi terutama bagi buruh miskin.

Kebijakan distribusi pangan yang cukup dengan tingkat regularitas yang tinggi serta harga yang terjangkau, selanjutnya menjadi salah satu program prioritas dari pemerintahan komunis di Kerala. Kini Kerala merupakan satu-satunya negara bagian di India yang di mana seluruh desa-nya dilayani oleh “toko makanan.”

Partai Kiri dan Kompetisi Elektoral

Cerita sukses yang terjadi di Kerala, menarik perhatian dunia karena negeri itu secara politik dikuasai oleh Partai Komunis India-Marxist (CPI-M/*the Communist Party of India Marxist*). Memang setelah runtuhnya Tembok Berlin, politik

kiri telah dianggap sebagai peninggalan masa lalu yang gagal. Sehingga ketika orang disuruh belajar tentang Kiri, khususnya tentang Marxis-me, maka yang dimaksud adalah belajar dari pengalaman kegagalannya.

Para pendukung kapitalisme, yang dengan halus menamakan dirinya pendukung pasar bebas, berkhotbah di panggung-panggung dunia bahwa kapitalismelah yang merupakan akhir sejarah. Semua alternatif telah diberi kesempatan oleh sejarah, dan semuanya terbukti gagal. Sebaliknya, sebagian kalangan Islam yang anti kapitalisme, tak kalah heroiknya dalam menista politik kiri. Kelompok ini mengajak umatnya untuk kembali ke langit guna menyelesaikan masalah yang ada di bumi. Menurut mereka, masalah terjadi karena penguasa bumi (*the secular city*) mencoba menandingi dan melawan penguasa langit (*the holy city*). Padahal, di langitlah asal dan tujuan kebenaran.

Tetapi di Kerala, klaim-klaim itu mendapat-

kan tantangannya yang serius. Justru karena hegemoni politik kiri inilah yang menyebabkan sukses Kerala tidak saja direkomendasikan menjadi “model pembangunan” bagi negara miskin dan berkembang tapi, juga dianggap sebagai model alternatif di luar kuasa neoliberalisme. Dalam kata-kata Michelle Williams, “....key to understanding Kerala’s successes in transforming projects is the role of the Communist Party,”⁵.

CPI (M): Singkat Cerita

Kerala, seperti seluruh negara bagian India lainnya, adalah sebuah negara yang demokratis. Tercatat ada sekitar 27 partai politik yang berkompetisi di sana. Mulai dari partai yang merupakan cabang dari partai di tingkat nasional, maupun partai lokal. Tetapi, layakanya dalam sistem multi partai, untuk bisa memenangkan pemilu,

⁵ Williams, Michelle, “The Politics of Socialism from Below: The Case of Kerala, India”, *The African Communist*, First Quarter, 2002.

partai-partai ini dipaksa untuk membangun sebuah koalisi. Dan di Kerala, dalam beberapa dekade terakhir sejak pemilu 1950an, terdapat dua koalisi besar yang mendominasi. Koalisi pertama datang dari sayap kiri yang didominasi oleh the Communist Party of India (Marxist). Koalisi ini dikenal dengan nama *Edathu pakasha Janadhy pathya Munnani*, yang berarti *Leftist Democratic Front*. Partai-partai yang bergabung dalam aliansi ini di antaranya CPM, CPI, J.D.(S), Kerala Congress (J) N.C.P, R.S.P and I.N.L. Koalisi besar lainnya datang dari sayap kanan yang dipimpin oleh Partai Kongres (I) yang dikenal dengan nama *Aikya Janadhipathya Munnani*, yang berarti *United Democratic Front*. Ikut bergabung dalam aliansi ini adalah Muslim League, Kerala Congress (M), J.S.S., R.S.P. and C.M.P.

Kedua kekuatan koalisi ini secara bergantian memenangkan pemilu di Kerala. Tetapi, yang membedakan antara CPI(M) dengan kekuatan lainnya adalah pengaruhnya yang sangat kuat di

kalangan masyarakat akar rumput. CPI(M) pertama kali berdiri pada tahun 1947 dengan nama Partai Komunis India (the Communist Party of India/CPI). Dalam garis perjuangannya, partai mengusung garis perjuangan parlementarian. Dalam pemilu 1957, secara nasional partai ini menjadi kekuatan oposisi terbesar terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Partai Kongres. Pada pemilu tahun yang sama pula, di Kerala CPI keluar sebagai pemenangnya.

Namun demikian, walau tampil sebagai kekuatan politik yang berpengaruh melalui garis parlementarian, partai ini tak luput dari konflik internalnya. Justru konflik itu dipicu salah satunya, oleh garis parlementarian yang diambil tersebut. Pada 1964, konflik internal tersebut berujung pada perpecahan yang melahirkan CPI dan CPI(M). Menurut CPI(M) membatasi perjuangan partai hanya pada arena parlementer amatlah tidak memadai untuk mempercepat penghapusan sistem feodalisme, mendistribusi-

kan hasil-hasil ekonomi secara merata dan meningkatkan taraf hidup sosial rakyat miskin. Bagi CPI(M) perjuangan parlementarian haruslah dibarengi dengan perjuangan ekstra-parlementer yang konsisten, yang tujuannya adalah melibatkan partisipasi penuh rakyat miskin dalam proses pengambilan kebijakan. CPI(M) ini kemudian mendapatkan dukungan penuh dari cabang Kerala, West Bengal, dan Tripura.

Perpecahan itu juga dilatarbelakangi oleh konflik antara Uni Sovyet dan Cina (konflik Sino-Sovyet), di mana CPI dituding terlalu dekat dengan Moskow dan CPI(M) akrab dengan Peking.

Partai dan Demokrasi Partisipatoris

Dengan dideklarasikannya CPI(M), sejak tahun 1960-an, aksi-aksi ekstra-parlementer yang bertujuan mendukung perjuangan parlementarian semakin intensif dilakukan. Pemogokan, pendudukan lahan, demonstrasi-demonstra-

si, kampanye penghapusan buta huruf, pendidikan massa dan pemetaan jumlah penduduk, merupakan aktivitas politik yang rutin. Dari perjuangan ekstra-parlementarian inilah, pemerintah kemudian dipaksa untuk mempercepat proyek-proyek yang bertujuan menghapuskan moda produksi feodal dan proyek-proyek sosial ekonomi lainnya.

Dalam perkembangannya, terutama semenjak tahun 1980an, fokus perjuangan partai mulai bergeser. Setelah berhasil menghapuskan modus produksi feodal, dan stagnasi ekonomi yang melanda India, CPI(M) berpendapat bahwa usaha-usaha untuk meningkatkan keterlibatan massa dalam partisipasi politik serta keterlibatan inisiatif lokal harus menjadi prioritas. Dalam amatan Williams, pergeseran fokus itu adalah dari perjuangan melawan sistem penindasan yang ada menjadi perjuangan untuk membentuk sebuah masyarakat baru melalui

penyatuan seluruh energi yang ada dalam masyarakat.

Mobilisasi massa dalam tahapan ini berarti, meningkatkan produksi, mendorong partisipasi dan melindungi sumber-sumber daya yang ada. Program utama dalam periode ini dikenal dengan nama "*The New Democratic Initiatives*," yang menekankan fokusnya pada tiga wilayah: pertama, kampanye buta huruf secara menyeluruh; kedua, pemasangan alat pemasak dengan tingkat efisiensi yang tinggi; dan ketiga, program pemetaan sumber daya manusia. Dalam menyukseskan program ini, peran *People's Science Movement* (PSM), sebuah organisasi akar rumput yang otonom sangatlah besar, terutama dalam mengambil inisiatif dan memperluas keterlibatan massa dalam program tersebut.

Pada dekade 1990-an, partai kemudian merumuskan tujuan bahwa gabungan antara kerja-kerja parlementer dengan ekstra-parlementer adalah memperdalam reformasi de-

mokrasi partisipatoris. Program ini diharapkan tidak hanya merupakan inisiatif pemerintah, tapi lebih-lebih kesadaran politik yang tinggi dari basis massa yang terdidik. Sehubungan dengan itu, lagi-lagi pada 1996, CPI(M) menginisiatifi kampanye desentralisasi demokrasi yang radikal (*a radical democratic decentralization campaign*). Desentralisasi demokrasi ini meliputi tiga bidang: pertama, desentralisasi struktur administratif; kedua, desentralisasi dalam hal alokasi fungsi-fungsi dan kekuasaan; dan ketiga, desentralisasi dalam hal kontrol terhadap sumber daya.

Latar belakang program ini adalah meningkatnya penyaluran dana negara dari negara bagian ke tingkat komunitas, dari 35 persen menjadi 40 persen. Sebagai contoh, pembiayaan lokal meningkat dari Rs. 1,000 juta pada 1996-97 (tahun sebelum kampanye dimulai) menjadi lebih dari Rs. 5,000 juta pada 2000-2021, yang menjadikan Kerala sebagai negara dengan “de-

rajaat pengeluaran lokal terbesar” di India dan kedua di seluruh negara berkembang setelah Kolombia.⁶ Tetapi, gelontoran dana yang besar, jika dikerjakan dan dikontrol secara teknokratis dan birokratis semata tidak akan membuat perubahan struktural yang signifikan. Di sinilah partai kemudian mengampunayakan sayap kedua dari desentralisasi demokrasi radikal itu, yakni peningkatan secara besar-besaran keterlibatan komunitas lokal dalam menginisiatifi pertemuan yang membahas kebutuhan lokal dan mempercepat pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan keterlibatan aktif rakyat di tingkat basis ini, maka partai menempatkan dirinya sebagai salah satu bagian dari proses besar untuk pembentukan masyarakat yang baru. Keterlibatan aktif komunitas ini juga menjadi dasar terbentuknya dewan rakyat (*people's assembly*). Pada akhirnya, rakyatlah yang harus memenu-

⁶ Michelle Williams, “Practising Democratic Communism: The Kerala Experience” dalam jurnal *Socialist Register*, 2018, 249.

hi dan menyelesaikan sendiri kebutuhan dan permasalahannya. Namun partisipasi rakyat itu akan sangat tergantung pada emosi atau gairah politik yang bersifat periodik jika tidak dilembagakan, sebab masalah yang dihadapi merupakan masalah hidup keseharian yang membutuhkan keterlibatan dan konsistensi aktif dari hari ke hari.

Menyadari dan mengantisipasi kelemahan itu, CPI(M) kemudian mempromosikan partisipasi melalui desain kelembagaan dan karenanya membentuk agensi politik yang bekerja secara bertahap selama siklus perencanaan anggaran tahunan. Tahap pertama adalah pembentukan Dewan Desa (*Gram Sabhas/village assemblies*), yang dilakukan di tingkat komunitas terkecil (*ward*) di mana (setiap dewan desa/*panchayat*, terdiri dari 10-20 komunitas), yang menghadirkan sekitar 1.500 hingga 2.000 partisipan untuk mengidentifikasi problem-problem lokal yang dibutuhkan dan memprioritaskan serta mencipt-

takan apa yang disebut sub-sektor *Development Seminars*. Biasanya *Gram Sabhas* ini dihelat 4 kali dalam setahun dan dilaksanakan pada hari libur di ruang publik, yang terbuka pada siapa saja untuk berpartisipasi dan melakukan publikasi melalui event dan medium populer seperti media massa, festival-festival, parade, iklan surat kabar dan artikel, selebaran, *talk show* radio, dan program-program di televisi.

Tahap kedua adalah pembentukan sub-sektor *Development Seminars* dengan menggunakan studi-studi partisipatoris untuk mengembangkan solusi bagi “kebutuhan yang dirasakan/*felt needs*” ke dalam “Laporan Pembangunan” yang menyeluruh. *Development Seminars* terdiri atas perwakilan *gram sabhas*, anggota-anggota dewan desa, pejabat-pejabat pemerintah, pemimpin-pemimpin politik, dan para pakar di bidangnya. Fase ketiga adalah pembentukan Gugus Tugas (*Task Force*) yang di kemudian hari berganti nama menjadi Kelompok-kelompok

Kerja (*Working Groups*) yang bertanggung jawab untuk menjabarkan laporan pembangunan ke dalam skema-skema proyek dan selanjutnya mengintegrasikannya ke dalam rencana pembangunan dewan desa. Gugus tugas ini terdiri dari wakil-wakil terpilih, pejabat, pakar, warga umumnya yang dipilih oleh *gram sabhas* dan para aktivis. Fase keempat adalah siklus perencanaan yang mengintegrasikan berbagai skema perencanaan Gugus Tugas ke dalam rencana anggaran dewan desa yang berkelindan dengan proposal-proposal lokal serta perencanaan pembangunan negara.⁷

Dari proses ini kita tahu bahwa proyek promosi partisipasi warga yang luas ini tidaklah mudah, salah satu sebabnya karena proses perencanaan itu membutuhkan keahlian spesifik yang sulit dipenuhi oleh semua orang atau mayoritas warga. Sehingga sangat mungkin bahwa

⁷ Ibid., h. 250.

proses partisipasi itu hanya berlangsung di tingkat terbawah tetapi begitu masuk ke perencanaan anggaran dan prioritas proyek yang lebih detail, pada akhirnya usulan-usulan dari bawah itu menguap atau terjungkir di kerumitan birokratis dan teknokrasi. Mengantisipasi kelemahan ini, Badan Perencanaan Negara (State Board Planning) menyelenggarakan program pelatihan besar-besaran di Kerala. 100 ribu sukarelawan dilatih untuk setiap fase proses perencanaan dalam rangka mendidik dan memobilisasi rakyat untuk aktif berpartisipasi dalam dewan-dewan rakyat (*people's assemblies*) dan keseluruhan proses pembangunan. Pada tahun pertama kampanye ini, 300 ribu partisipan menghadiri *development seminars* dengan 100 ribu sukarelawan belajar memformulasikan proyek-proyek desa, yang pada akhirnya terartikulasi ke dalam perencanaan desa dengan bantuan dari 35.000 sukarelawan. Tujuh kali pelaksanaan pelatihan dilaksanakan di berbagai level pemerintah-

an terhadap 15.000 perwakilan terpilih, 25.000 pejabat pemerintah, dan 75.000 sukarelawan. Di samping pelatihan-pelatihan formal, menurut Williams, pelatihan-pelatihan dan proses saling-belajar informal juga marak berkecambah.⁸

Pelajaran Dari Kerala

Menyimak peran dan keterlibatan Partai Komunis India (Marxis) yang sangat luas dalam keberhasilan pembangunan di Kerala, ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran.

Pertama, aksi-aksi revolusioner ternyata bisa dilaksanakan di sebuah negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah. Seperti dikatakan Michelle Williams, pengalaman Kerala telah menantang asumsi-asumsi yang telah mapan mengenai pembangunan bahwa redistribusi kemakmuran hanya mungkin dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan mendasarkan diri pada keterlibatan aktif masya-

⁸ Ibid., h. 251.

rakat akar rumput dan pemanfaatan secara maksimal lembaga demokrasi parlementer dalam usahanya untuk menentang agenda-agenda neoliberal, CPI(M) berhasil mempercepat alternatif pembangunan yang radikal dengan memberi prioritas pada keadilan sosial dan ekonomi serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

Kedua, pengalaman Kerala telah menerbitkan pertanyaan penting mengenai watak dan lokasi kekuasaan. Di Kerala, kekuasaan tidak hanya bermakna kekuasaan negara (*state power*), tapi lebih dari itu adalah pengaruh dan hegemoni CPI(M) yang sangat kuat dalam lembaga-lembaga masyarakat sipil. CPI(M) membuktikan bahwa perjuangan revolusioner, baik melawan sistem yang menindas maupun dalam membangun sistem masyarakat baru yang egaliter, tidak harus selalu melalui aparatus kekuasaan negara. Dengan hegemoni yang kuat dan tidak adanya kekuatan lain yang mampu mengim-

bangi pengaruh CPI(M) di massa akar rumput, program-program partai menjadi lebih nyata dirasakan oleh massa. Dan sebaliknya, massa memiliki kepercayaan bahwa aspirasinya akan diperjuangkan oleh partai di dalam badan legislatif. Dengan demikian, lokasi kekuasaan tidak hanya berada di wilayah negara, tapi juga dalam masyarakat.

Ketiga, pengalaman Kerala telah melahirkan pertanyaan menarik lainnya mengenai peran sebuah partai politik revolusioner. Berbeda dengan partai-partai kiri revolusioner lainnya yang bergerak di bawah panduan konsep-konsep yang abstrak, CPI(M) bergerak berdasarkan sinergi yang kokoh antara peran partai sebagai pelopor dengan keterlibatan aktif dari massa basis. Dengan demikian, kepeloporan dimaknai sebagai pengakuan mayoritas akan tindakan-tindakan yang diambil oleh partai. Dalam pengertian ini, CPI(M) adalah sebuah partai yang lebih menekankan pada aksi politik dengan komitmen

men yang tinggi yang diimbangi dengan kapasitas kader-kader partai melalui kekuasaan negara.

Keempat, ketika CPI(M) mendeklarasikan tentang kebijakan desentralisasi demokrasi, muncul pertanyaan bagaimana hal itu dikaitkan dengan prinsip sentralisme-demokrasi (*sendem*) yang dianut oleh partai? Terhadap pertanyaan ini, CPI(M) menjawab bahwa prinsip-prinsip organisasi partai ini harus dibedakan dengan prinsip-prinsip pengorganisasian masyarakat secara umum. Partai tetap meyakini bahwa hanya dengan mekanisme *sendem*lah partai bisa memelopori dan memberi panduan untuk menjawab kompleksitas persoalan politik dan menyediakan kepemimpinan yang teguh bagi perubahan revolusioner. Namun demikian, *sendem* tak bisa dijadikan model dalam mengorganisasi masyarakat. Masyarakat terlalu kompleks, terlalu beragam, dan memiliki posisi sosial, politik, dan ekonomi yang tidak setara. Tugas utama

partai (dan inilah bentuk kepeloporan itu) adalah terus-menerus menciptakan ruang bagi keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan.

Pada akhirnya, Kerala adalah saksi hidup bahwa sejarah belumlah berakhir, bahwa masih ada alternatif lain yang mungkin di luar alternatif kapitalisme-neoliberal. Pertanyaan yang kemudian tersisa adalah: bagaimana kita bisa mereplikasi pengalaman keberhasilan Kerala ini dalam konteks masyarakat Indonesia hari ini?

Versi asli artikel ini telah terbit di harian *IndoPROGRESS*, 10 April 2006, <https://indoprogress.com/2006/04/sosialisme-dari-bawah-2/>

Daftar Pustaka

Campion, Sonali, "Amartya Sen: India can't become a global economic power with an

uneducated, unhealthy workforce”, <https://qz.com/india/557199/amartya-sen-in-india-cant-become-a-global-economic-power-with-an-uneducated-unhealthy-workforce/>

Govindan Parayil (ed.), 1999, *The Kerala Model of Development: Perspectives on Development and Sustainability*, London: Zed Books.

Franke, Richard and Barbara Chasin, 1994. *Kerala: Radical Reform as Development in an Indian State*, Food First Book.

Kristen, Sam, “The Kerala Model Analysis of the developmental model in the Kerala state in India, its success, and its duplicability”, https://www.academia.edu/9816807/The_Kerala_Model

Oommen, M.A. (ed.), 1999. *Rethinking*

Development: Kerala's Development Experience Vol. I, New Delhi: Institute of Social Sciences [and] Concept Pub. Co.

Tharamangalam, Joseph, 1998. *The Perils of Social Development without Economic Growth: The Development Debacle of Kerala*, India. <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14672715.1998.10411031>

Williams, Michelle, "The Politics of Socialism from Below: The Case of Kerala, India", *The African Communist*, First Quarter, 2002.

Williams, Michelle, 2018. "Practising Democratic Communism: The Kerala Experience". In Panitch, Leo and Greg Albo, "Rethinking Democracy", *Socialist Register Journal*, Merlin Press, London.

Biodata Penulis

Coen Husain Pontoh adalah Editor *IndoPROGRESS*. Ia memperoleh gelar M.A dalam ilmu politik dari Graduate Center for Workers Education (GCWE), Brooklyn College, City University of New York (CUNY). Buku terbarunya sebagai editor dan kontributor adalah *Oligarki: Teori dan Kritik*, yang diterbitkan oleh Marjin Kiri, 2019.